



KOMISI INFORMASI

PROVINSI
SUMATERA UTARA

LAPORAN TAHUNAN

2024





BUDAYA KETERBUKAAN INFORMASI MERUPAKAN BINGKAI KEBANGSAAN

**Kalau Bersih
Tak Perlu Risih**

Jadilah Pelopor Keterbukaan Informasi Publik



KATA PENGANTAR

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan amanat konstitusi Negara Undang-undang 1945 pasal 28 f dan UU 14 2008 KIP dan peraturan pelaksanaannya, serta menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas untuk menyelesaikan permohonan sengketa informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi nontiligasi. Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan jika diperlukan dapat dibentuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota.

Keterbukaan informasi memberikan akses kepada publik untuk memperoleh informasi yang bermanfaat sekaligus sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dalam rangkai mewujudkan Visi Komisi Informasi Provsu yaitu “Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Menuju Provinsi Sumatera Utara Berjaya” dan Misi Komisi Informasi Provsu yaitu “Mendorong Partisipasi Masyarakat Untuk Menggunakan Hak Konstitusionalnya Dalam Hal Keterbukaan Informasi Publik dan Mendorong Badan Publik Untuk Memberikan Layanan Informasi Yang Berkualitas”, maka setiap tahunnya Komisi Informasi Provsu menyampaikan Laporan tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepada Gubernur Sumatera Utara dan DPRD Provsu.

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang terdiri dari 5 komisioner yaitu ketua, wakil ketua dan anggota komisioner Komisi Informasi yang membidangi 3 (tiga) Divisi yaitu Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi, Divisi Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi dan Divisi Kelembagaan. Selanjutnya laporan ini menjadi gambaran pelaksanaan kegiatan dan penggunaan APBD Tahun Anggaran 2024, juga menjadi sinergi untuk memperbaiki kinerja pengelolaan informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara agar terus ditingkatkan melalui beragam program Keterbukaan Informasi Publik. Harapanya, pelayanan kepada Publik dan Badan Publik dapat berjalan sesuai rencana untuk mendukung transparansi publik.

Medan, Desember 2024

Ketua

Dr. Abdul Harris Nasution, SH, M.Kn



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Profil Komisioner.....	5
Struktur Kesekretariat.....	12
Visi dan Misi	13
Rencana Strategi.....	14
Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang	16
Laporan Kinerja	
A. Penyelesaian Sengketa Informasi.....	17
1. Ajudikasi.....	20
2. Mediasi.....	25
3. Gugur.....	27
4. Pencabutan Permohonan.....	28
5. Proses Penyelesaian.....	28
6. Jadwal Sidang.....	29
7. Foto Persidangan	32
B. Kelembagaan, Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi.....	41
1. Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Edukasi.....	41
2. Kegiatan Komisi Informasi, Audiensi dan Koordinasi	52
3. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.....	70
4. Forum Group Discussion (FGD).....	95
5. Kerjasama dengan Stakeholder.....	97
C. APBD Komisi Informasi Tahun 2024.....	102
Penutupan.....	106



PROFIL KOMISIONER



Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2022 – 2026 dilantik langsung oleh Edy Rahmayadi Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 31 Maret 2022 di Aula Tengku Rizal Nurdin Jl. Jend. Sudirman No. 41 Medan dan ditetapkan pada surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/77/KPTS/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang susunan keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- Dr. Abdul Harris Nasution, SH, M.Kn
Ketua Komisi Informasi



- Drs. Eddy Syahputra AS, MSi
Wakil Ketua Komisi Informasi





- Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A
Ketua Divisi Kelembagaan



- Muhammad Safii Sitorus, SH
Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi



- Dedy Ardiansyah, S.Sos
Ketua Divisi Advokasi, Sosialisasi,
dan Edukasi (ASE)





Dr. Abdul Harris Nasution, SH, M.kn

Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara



Sikap terbuka dalam ruang dan waktu begitu penting. Waktu akan menilai dan mencatat semua Gerakan kehidupan ini, khususnya Ketika saya Abd. Harris, menerima Amanah sebagai Ketua Informasi Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2026.

Lahir di kota kecil Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun pada tahun 1959, menempuh Pendidikan terakhir Prodi S3 Fakultas Hukum Sumatera Utara. Pengalaman dari waktu kuliah, asisten pengacara hingga advokat, sebagai wartawan TEMPO pada waktu itu, telah

memberikan inspirasi untuk menghadapi berbagai persoalan. Waktulah yang akan mencatat. Semoga di perjalanan yang dibatasi dengan WAKTU, Allah memberikan Rahmad dan Hidayah Nya agar kehidupan ini diterima dunia dan akhirat. Aamiin ya Robbal'Alamin.



Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si

Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara



“Alhamdulillah.”, itulah satu kata yang terucap sebaik mendengar hasil musyawarah mufakat dalam sidang lengkap Komisi A DPRD Sumut yang memastikan dirinya bersama empat calon lainnya untuk ditetapkan sebagai Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara periode 2022-2026, kemudian dilantik dan dikukuhkan oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pada 31 Maret 2022. Amanah ini merupakan periode kedua di lembaga tersebut setelah sebelumnya di periode 2017-2021. Inilah yang patut disyukuri, karena Allah SWT masih memberikan kesempatan untuk melaksanakan amanah lanjutan guna mengawal pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagi komisioner yang akrab disapa dengan Eddy Sormin ini, amanah di Komisi Informasi Publik (KIP) merupakan tantangan dalam menjalankan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bertugas atau bekerja di Lembaga Negara mandiri seperti ini yang mengendapkan kolegial dalam setiap mengambil keputusan bukanlah hal baru bagi dirinya, karena sebelum masuk di Komisi Informasi, dirinya juga dipercaya selama dua periode sebagai komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut.

Lebih dari pribadi hidupnya menggeluti dunia pers, ternyata beliau dilahirkan di kota kecil dipinggir Selat Malaka, Labuhan Bilik, Kabupaten Labuhan Batu, Sumut pada 11 Oktober 1962. Mengikuti pendidikan dasar SD dan SMP di tanah kelahirannya (1968-1977) dan melanjutkan pendidikannya di SGO Negeri Medan (1977-1981) dan FPOK IKIP Negeri Medan (1981-1986). Beliau juga pernah menjadi jurnalis dan jurnalis di harian Waspada Medan (1981-2000), hingga kini masih tercatat sebagai anggota PWI Sumut dan terakhir pada tahun 2012 menerima satya lencana kesetiaan 15 tahun anggota PWI serta tercatat sebagai penerima sertifikat Wartawan Utama Hasil Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Terakhir, ditengah kesibukannya beliau masih sempat menyelesaikan program Magister di UPMI Medan tahun 2015. Selama perpanjangan di Komisi Informasi Provinsi Sumut Eddy Sormin juga mengikuti berbagai pendidikan yang mendukung kiprahnya sebagai salah seorang anggota majelis mengajukan informasi.

Dia juga adalah sebagai penerima sertifikat kompetensi sebagai Mediator terakreditasi Mahkamah Agung RI sejak 26 Januari 2018 dan sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Perancangan Naskah Hukum yang dilaksanakan Jimly School of Law and Government di bawah pimpinan Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, SH

Suami dari Dra. Lely Yustina Lubis yang kini berstatus sebagai Wakil Ketua KIP Sumut memiliki hobi bermain bowling dan billiard dengan memiliki empat anak berturut-turut dr. Frida Adhani Sormin, M.Ked (OG), Sp.OG, dr. Mhd. Ferhat Sormin, dr. Ella Finarsih Sormin dan Hasri Ainun Bestari Sormin, SKM.



Dedy Ardiansyah S.Sos

Ketua Divisi Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi

Keterbukaan informasi bukan hal baru bagi seorang Dedy Ardiansyah. Ini tidak terlepas dari perjalanan pengelolaan sebagai jurnalis lebih dari 20 tahun. Menggeluti dunia jurnalistik sejak tahun 1999, tentu banyak pengalaman dalam memperjuangkan informasi agar segera sampai ke masyarakat. Tidak berlebihan bila profesi jurnalis itu pula menjadikan lelaki



kelahiran Rantau Prapat 2 Mei 1977, menjadi pribadi yang berkarakter kuat, bertanggung jawab, jujur dan berintegritas. Sebagai jurnalis, Bapak dari dua orang anak ini dapat berkomunikasi dengan berbagai pihak, mulai dari masyarakat kecil hingga pejabat tinggi negara. Dalam menjalankan profesi jurnalis tersebut, ia selalu menyimpan prinsip kemandirian demi kepentingan masyarakat banyak.

Pengalaman menjadi ketua organisasi kewartawan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan periode 2005-2007, menjadi pintu masuk dalam menegakkan prinsip jurnalis yang mandiri, profesional serta bertanggung jawab. Prinsip yang tetap teguh ia lakukan, bahkan ketika menerima amanah sebagai Pemimpin Redaksi berbagai cetak harian maupun level pimpinan di keredaksian media online baik di Kota Medan hingga Kota Pekanbaru, Riau.

Sikap profesional dan prinsip-prinsip kepribadian yang berintegritas ini dibutuhkan ketika menjadi salah satu anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Independensi dan kemandirian sebagai komisioner, apalagi ketika menjadi majelis komisioner, harus selalu dikedepankan dalam membuat keputusan sengketa informasi publik.

Sesuai amanat UU 14 Tahun 2008, Komisi Infomasi adalah lembaga kuasi peradilan, yang bertugas menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi dengan menyelesaikan asas keadilan bagi semua pihak.

Bagi seorang Dedy Ardiansyah, berprofesi sebagai jurnalis adalah jalan terbaik yang Allah berikan. Profesi ini menjadi jembatan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Profesi yang kemudian mengantarkannya untuk mengabdikan diri kepada negara sebagai komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara (KI Sumut) sebagai Ketua Divisi Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE) periode 2022-2026.

Insya Allah, Amin ya Rabbal Alamin...



Muhammad Safii Sitorus, SH, M.I.Kom

Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi



"Setiap Orang Ada Masanya
Setiap Masa Ada Orangnya"

Muhammad Safii Sitorus atau yang biasa dipanggil dengan Safii Sitorus berasal dari keluarga sederhana. Lahir melalui pasangan Almarhum Abu Sammah Sitorus dan Almarhumah Rohani Manurung pada 24 September 1979 di Desa Tinggi Raja, Kecamatan Tinggi Raja (dulu Kecamatan Buntu Pane), Kabupaten Asahan.

Anak Desa Tinggi Raja ini memulai pendidikannya di SD Negeri No 010 111 Desa Tinggi Raja (1986 Tammat 1992) dan melanjutkan ke MTS YAPI Tinggi Raja (1992 Tamat 1995) serta di MAN Kisaran (1995-1998).

Usai menamatkan pendidikan di MAN Kisaran, Safii Sitorus melanjutkan studi di Akademi Maritim Indonesia (AMI) Jurusan Nautika Medan (1998-2002). Ditengah proses pendidikan di AMI Medan beliau juga mengambil Program Studi Diploma II Manajemen Bina Mental Keagamaan (MBMK) di Fakultas Ushuluddin IAIN Sumut (sekarang UIN Sumut) (1999-2001). Tahun 2015 Safii Sitorus melanjutkan pendidikan Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Graha Kirana dan diwisuda pada Tahun 2019 serta melanjutkan pada Pendidikan S-2 di Universitas Darma Agung dan diwisuda pada Tahun 2023 ini.



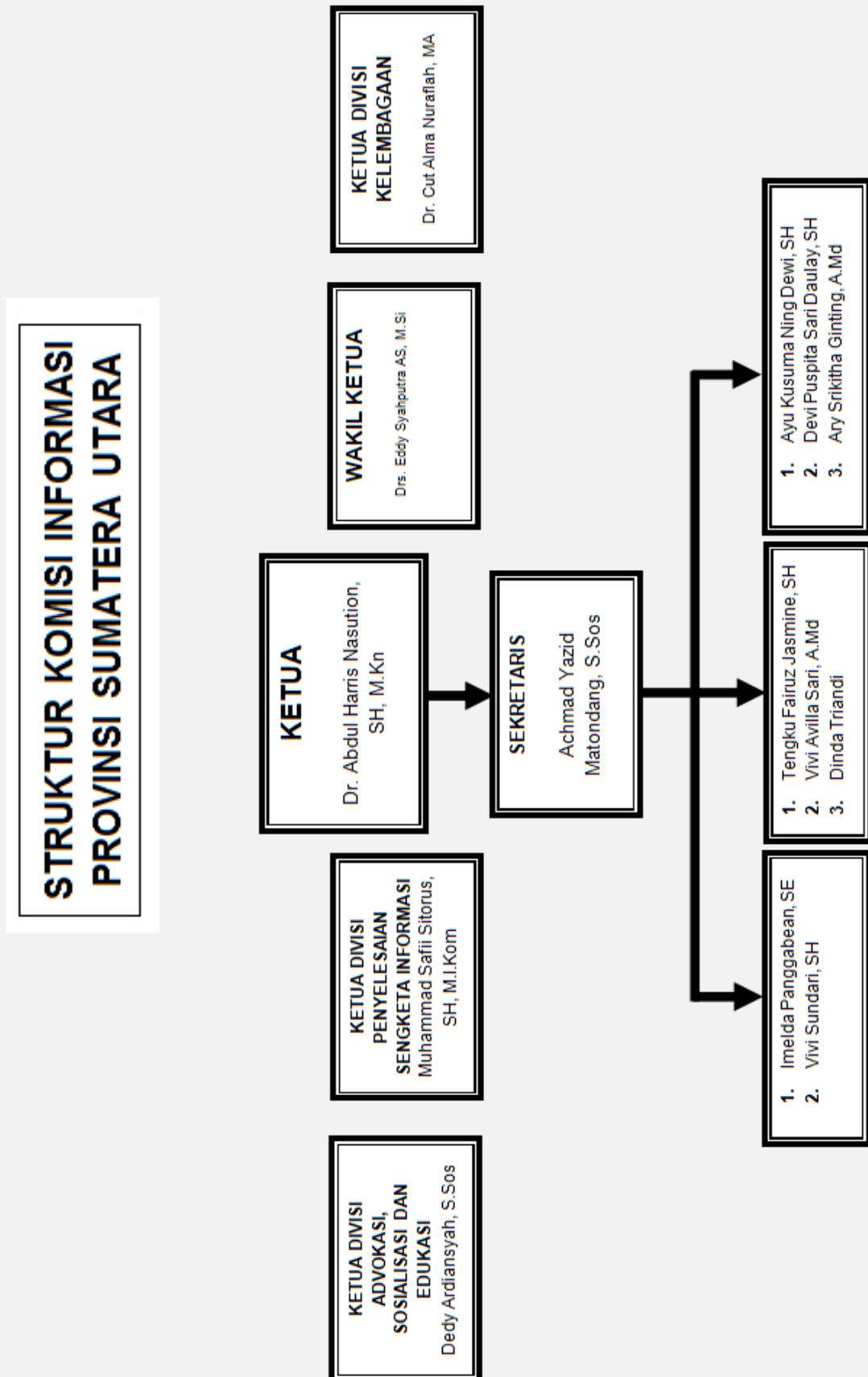
Dr. Cut Alma Nuraflah, MA

Ketua Divisi Kelembagaan

Cut Alma Nuraflah, menghabiskan masa kecil di sebuah desa, di daerah Kandang, Aceh Utara. Setelah reformasi, pada tahun 1999 Cut Alma hijrah ke kota Medan dan berkuliah di Universitas Sumatera Utara hingga memperoleh gelar Sarjana dari FISIP-USU. Pasca Tsunami 2004, Cut Alma aktif dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pekerja sosial di berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri. Cut Alma mulai mengabdikan dirinya di kampus dunia sebagai Dosen setelah menyandang gelar Master of Arts dari UIN-SU di Tahun 2013 dan juga telah menyelesaikan program Doktoralnya di tahun 2019 dari kampus yang sama.

Lebih dari delapan tahun menjalani tridarma Perguruan Tinggi, beliau terpanggil untuk mengabdikan dirinya lebih dalam lagi ketengah-tengah masyarakat Sumatera Utara. Keinginan untuk mengabdikan pada Provinsi Sumatera Utara kemudian mendapatkan jalan dengan terpilihnya beliau sebagai Komisioner di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021. Cut Alma dipilih sebagai ketua bidang Kelembagaan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan informasi di Provinsi Sumatera Utara, semoga beliau dapat terus menjaga amanah dan memegang teguh integritas dalam menjalankan tugas sebagai komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara periode 2022-2026.







VISI DAN MISI

VISI

Terwujudnya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga mandiri dan independen dalam menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008.

MISI

1. Membangun lembaga Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang profesional dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.
2. Melayani dan menyelesaikan sengketa informasi publik antara badan publik dengan pemohon informasi secara adil dan setara serta menegakkan segala peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan informasi publik secara konsisten.
3. Membangun kesadaran masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
4. Menyadarkan semua lapisan masyarakat bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dan keterbukaan informasi publik adalah bagian dari pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya terutama sekali dalam mencegah terjadinya korupsi.



RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Periode 2022-2026

A. Rencana Strategis

1. Penguatan Organisasi

Indikator : Terciptanya sistem kerja organisasi dengan dukungan sekretariat yang kuat dan fasilitas memadai di lingkup kerja Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

2. Penguatan Kinerja Komisioner

Indikator : terselesaikannya sengketa informasi publik di Provinsi Sumatera Utara sesuai ketentuan UU KIP.

3. Penguatan Jaringan Kerjasama

Indikator : Terbangunnya jaringan kerja sama dengan *stakeholder* di Provinsi Sumatera Utara, guna mewujudkan iklim keterbukaan informasi di badan-badan publik.

4. Monitoring dan Evaluasi

Indikator : Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan-badan publik di Provinsi Sumatera Utara, serta terwujudnya akses informasi publik yang mudah, cepat dan murah sesuai Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).



B. Strategi Program

1. Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi

- Menangani sengketa informasi sesuai UU KIP.
- Pelatihan mediasi dan adjudikasi.
- Diskusi ahli dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik.
- Memfasilitasi pembentukan jaringan kerja bantuan hukum.
- Menyiapkan tim ahli profesional bidang adjudikasi non litigasi.
- Menyiapkan tenaga panitera yang profesional dengan spesifikasi pendidikan dan keahlian memadai.

2. Divisi Kelembagaan

- Menjalin kerja sama dengan lembaga lain.
- Melaksanakan bimbingan teknis di badan publik untuk penerapan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).
- Mendorong pembentukan PPID di badan publik.
- *Monitoring* dan evaluasi (*monev*) badan publik.
- Mengikuti pelatihan mediasi dan Bimbingan Teknis lainnya.

3. Divisi Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi

- Melaksanakan diskusi publik reguler dengan *stakeholder*.
- Pengelolaan situs KI Sumut.
- Dialog interaktif di televisi, radio, perguruan tinggi, dan lainnya.
- Melaksanakan dialog dan diskusi dengan mahasiswa, pers, Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lainnya.



TUGAS POKOK, FUNGSI, WEWENANG

1. Tugas Pokok Berdasarkan Pasal 26 UUKIP, Tugas Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini.
2. Fungsi Berdasarkan Pasal 23 UUKIP, Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UUKIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi.
3. Wewenang Berdasarkan Pasal 27 UUKIP dalam menjalankan tugasnya Komisi Informasi memiliki wewenang :
 - a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa.
 - b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik.
 - c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik.
 - d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi Nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik.
 - e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Dengan demikian Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara mempunyai kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.



A. LAPORAN DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Penyelesaian Sengketa Informasi di Provinsi Sumatera Utara adalah upaya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi yang berkaitan dengan memperoleh dan menggunakan informasi. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara diberikan kewenangan untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik, yang menyangkut Badan Publik di tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan UU KIP, Komisi Informasi Provinsi bertugas untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

- Perbandingan Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2023 dan 2024

Mulai Januari - Desember 2024, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menerima pendaftaran pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi sebanyak **58 (lima puluh delapan)** sengketa, sebagaimana dapat dilihat pada Diagram 1. Jumlah permohonan informasi tahun ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan pengajuan pada tahun 2023, yaitu sebanyak **79 (tujuh puluh sembilan)** sengketa informasi publik.

Diagram 1.
Data Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Bulan Januari – Desember Tahun 2023

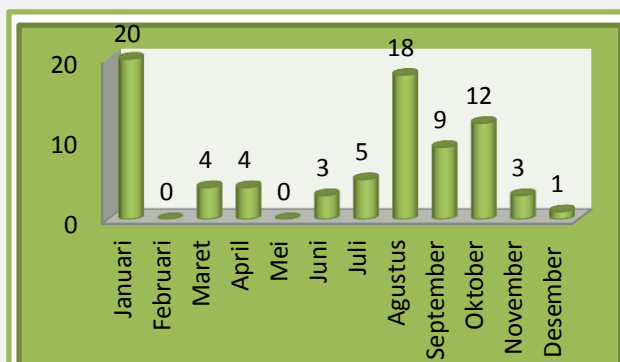
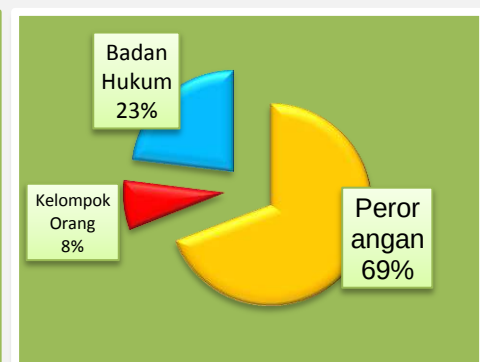


Diagram 2.
Data Jumlah Pemohon PSI berdasarkan Identitas

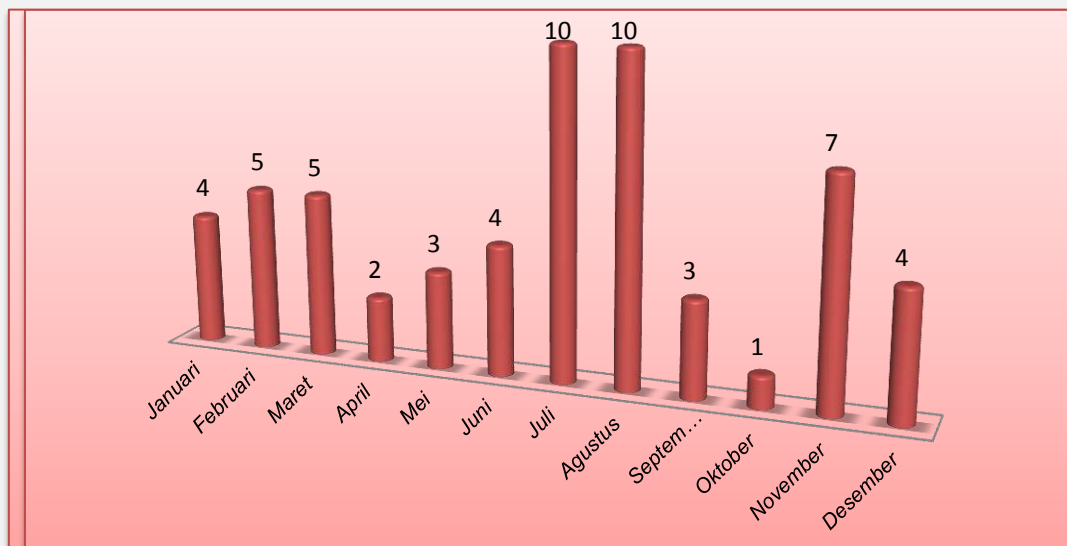


Tabel 1.
Data jumlah Termohon PSI

No.	Data Jumlah Termohon 2023	Jumlah
1.	Sekolah	7
2.	Pemerintah	32
3.	Partai	19
4.	Penyelenggara Pemilu	1
5.	Desa	19
6.	BUMN/BUMD	1
Jumlah		79

Diagram 1 memperlihatkan bahwa dari 79 jumlah Pengajuan PSI ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara paling banyak berada pada bulan Januari 2023, yaitu sebanyak 20 Pengajuan PSI dan data pemohon PSI di dominasi oleh identitas Perorangan yaitu sebanyak 69% atau 40 Pengajuan PSI.

Diagram 3.
Data Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Bulan Januari – Desember Tahun 2024

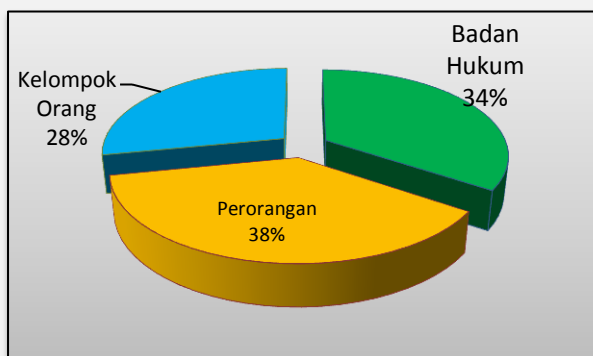


Gambar 1. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tiap bulan di tahun 2024

Diagram 3 memperlihatkan bahwa dari 58 jumlah Pengajuan PSI ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara paling banyak berada pada bulan Juli dan Agustus 2024, yaitu sebanyak 10 Pengajuan PSI.

Selanjutnya diagram 4 menunjukkan persentase Pemohon berdasarkan identitasnya. Pemohon pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 ini didominasi oleh Pemohon dengan identitas Perorangan yaitu sebanyak 38%.

Diagram 4.
Data Jumlah Pemohon PSI berdasarkan Identitas



Tabel 2.
Data jumlah Termohon PSI

No.	Data Jumlah Termohon 2024	Jumlah
1.	Sekolah	14
2.	Pemerintah	32
3.	Penyelenggara Pemilu	2
5.	Desa	9
6.	Universitas	1
Jumlah		58



Pada bulan Januari – Desember tahun 2024 Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara telah melakukan upaya Penyelesaian terhadap sengketa yang teregistrasi dengan melakukan persidangan sebanyak 93 register sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.
Upaya Penyelesaian Register Sengketa
Melalui Persidangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
Januari – Desember 2024

No.	Upaya Penyelesaian	Register 2022	Register 2023	Register 2024	Jumlah
1.	Telah disidangkan	11	24	58	93
Total					93

Dari upaya persidangan yang telah dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, terdapat sebanyak 86 register dinyatakan sengketa telah selesai sebagaimana dapat dilihat dari hasil penyelesaian register sengketa selama periode tahun 2024 pada tabel berikut:

No.	Hasil Persidangan	Jumlah
1.	Keluar Putusan Ajudikasi	50
2.	Keluar Putusan Mediasi (Sepakat)	21
3.	Keluar Penetapan Pencabutan Sengketa	4
4.	Keluar Penetapan Gugur	11
Jumlah		86

Tabel 4. Jumlah Putusan yang dikeluarkan di tahun 2024

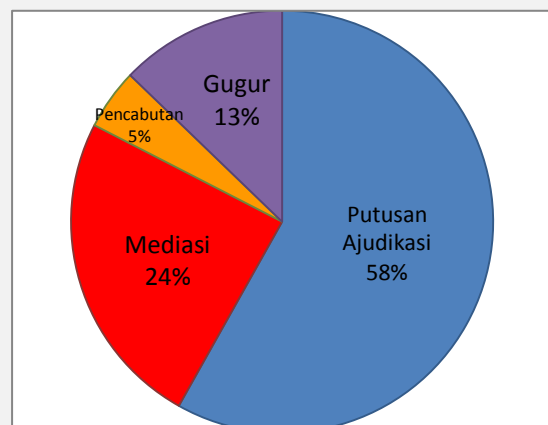


Diagram 5. Persentase Jumlah Putusan yang dikeluarkan tahun 2024

Kegiatan yang menjadi tanggung jawab badan PSI ini adalah pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik dan peningkatan kualitas layanan penyelesaian sengketa informasi publik. Adapun Rekapitulasi putusan penyelesaian sengketa informasi publik dengan berhasil Ajudikasi, Mediasi, Penetapan Pencabutan dan Penetapan gugur.



1. Penyelesaian Sengketa Informasi Berhasil di Ajudikasi Nonlitigasi

No	Pemohon	Termohon	Register	Putusan
1	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 2 Tarutung Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara	96/KIP-SU/S/XI/2022	Tanggal : 31 Januari 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi
2	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 3 Tarutung Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara	97/KIP-SU/S/XI/2022	Tanggal : 31 Januari 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi
3	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 4 Tarutung Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara	98/KIP-SU/S/XI/2022	Tanggal : 31 Januari 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi
4	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Bukit Tujuh Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan	08/KIP-SU/S/II/2023	Tanggal : 18 Januari 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi
5	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Beringin Jaya Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan	09/KIP-SU/S/II/2023	Tanggal : 18 Januari 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi
6	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Mandalasena Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan	10/KIP-SU/S/II/2023	Tanggal : 18 Januari 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi
7	Ferdinand Sitepu	Atasan PPID Badan Pertanahan Negara Kota Medan	31/KIP-SU/S/VII/2023	Tanggal : 16 Januari 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi
8	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Parmonangan Kec. Simanindo Kab. Samosir	35/KIP-SU/S/VII/2023	Tanggal : 31 Januari 2024 Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi
9	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Paraduan Kec. Ronggur Nihuta Kab. Samosir	36/KIP-SU/S/VIII/2023	Tanggal : 19 Februari 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi
10	Kantor Hukum Panangian & Partners	Atasan PPID BPN Langkat	60/KIP-SU/S/IX/2023	Tanggal : 30 Januari 2024 Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi
11	DPP Pemantau Independen Peduli Pembangunan Nusantara	Direktur RSUD Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara	61/KIP-SU/S/IX/2023	Tanggal : 16 Januari 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi



12	Yudi Pratama	Atasan PPID DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumut	63/KIP-SU/S/X/2023	Tanggal : 18 Maret 2024 Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi
13	Yudi Pratama	Atasan PPID DPD Partai Demokrat Sumut	64/KIP-SU/S/X/2023	Tanggal : 22 Januari 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya dalam sidang Ajudikasi
14	Yudi Pratama	Atasan PPID DPW Partai Nasional Demokrat Sumut	65/KIP-SU/S/X/2023	Tanggal : 22 Januari 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi
15	Ibrahim	Atasan PPID DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Sumut	66/KIP-SU/S/X/2023	Tanggal : 22 Januari 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi
16	Ibrahim	Atasan PPID DPD Partai Golongan Karya Sumut	67/KIP-SU/S/X/2023	Tanggal : 18 Maret 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi
17	Ibrahim	Atasan PPID DPW Partai Amanat Nasioanal Sumut	68/KIP-SU/S/X/2023	Tanggal : 22 Januari 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya dalam sidang Ajudikasi
18	Hidayat	Atasan PPID DPW Partai Keadilan Sejahtera Sumut	69/KIP-SU/S/X/2023	Tanggal : 18 Maret 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi
19	Hidayat	Atasan PPID DPW Partai Kebangkitan Bangsa Sumut	70/KIP-SU/S/X/2023	Tanggal : 23 Januari 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya dalam sidang Ajudikasi
20	Hidayat	Atasan PPID DPD Partai Hati Nurani Rakyat Sumut	71/KIP-SU/S/X/2023	Tanggal : 23 Januari 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya dalam sidang Ajudikasi
21	Linda Wahyu Marpaung	Atasan PPID DPD Partai Persatuan Pembangunan Sumut	72/KIP-SU/S/X/2023	Tanggal : 23 Januari 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya dalam sidang Ajudikasi
22	Dian Wahyudi	Direktur PT. Persero Pelindo Belawan	73/KIP-SU/S/X/2023	Tanggal : 15 Januari 2024 Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi
23	Dian Asmara Siregar	Kepala Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang	74/KIP-SU/S/X/2023	Tanggal : 20 Februari 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi



24	Dapot Hasiholan Purba	Atasan PPID Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematang Siantar	77/KIP-SU/S/XI/2023	Tanggal : 21 Februari 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi
25	Muhammad Ikhwan, SH, Ermansyah Napitupulu, M. Yakub Nasution dan Mulyadi	Atasan PPID Desa Dolok Masango Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai	01/KIP-SU/S/II/2024	Tanggal : 20 Februari 2024 Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi
26	Muhammad Ikhwan, SH, Ermansyah Napitupulu, M. Yakub Nasution dan Mulyadi	Atasan PPID Desa Sarang Torop Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai	02/KIP-SU/S/II/2024	Tanggal : 20 Februari 2024 Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi
27	Muhammad Ikhwan, SH, Ermansyah Napitupulu, M. Yakub Nasution dan Mulyadi	Atasan PPID Desa Tanjung Harap Kec. Serba Jadi Kab. Serdang Bedagai	03/KIP-SU/S/II/2024	Tanggal : 20 Februari 2024 Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi
28	Herry Dani Lubis	Atasan PPID KPU Kota Binjai	04/KIP-SU/S/II/2024	Tanggal : 30 Januari 2024 Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi
29	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Aek Nauli Kec. Medang Deras Kab. Batubara	05/KIP-SU/S/II/2024	Tanggal : 24 April 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi
30	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Tanjung Sari Kec. Laut Tador Kab. Batubara	06/KIP-SU/S/II/2024	Tanggal : 24 April 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi
31	Rio Darmawan Surbakti	Atasan PPID Universitas Prima Indonesia	11/KIP-SU/S/III/2024	Tanggal : 4 Juni 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi
32	Pasti Tua Siregar, Nasir Wardiansan Harahap dan Zulkifli Harahap	Kapolda Sumatera Utara	14/KIP-SU/S/III/2024	Tanggal : 27 Mei 2024 Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi
33	Pasti Tua Siregar	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas	15/KIP-SU/S/IV/2024	Tanggal : 6 Mei 2024 Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi
34	Pasti Tua Siregar	Atasan PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas	01/REG-KIP-SU-PSIP/IV/2024	Tanggal : 27 Mei 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi
35	DPD Dharma Advokasi Masyarakat	Kepala SD Negeri No 101303 Batu Godang Kecamatan	16/KIP-SU/S/V/2024	Tanggal : 19 Juni 2024 Menolak permohonan sengketa informasi dalam



	Indonesia	Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan		sidang Ajudikasi
36	Frisdarwin Arman Bakti	Kepala SMA Negeri 8 Medan	17/KIP- SU/S/VI/2024	Tanggal : 6 Agustus 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya dalam sidang Ajudikasi
37	Eky Kuswandi	Atasan PPID MAN 2 Model Medan	20/KIP- SU/S/VI/2024	Tanggal : 30 Juli 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi
38	Eky Kuswandi	Atasan PPID PUD Pasar Kota Medan	22/KIP- SU/S/VI/2024	Tanggal : 30 Juli 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya dalam sidang Ajudikasi
39	DPD LSM Lembaga Peduli Rakyat Indonesia Provsu	Kepala SMK Negeri 1 Pakkat Kab. Humbang Hasundutan	24/KIP- SU/S/VII/2024	Tanggal : 13 Agustus 2024 Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi
40	DPD LSM Lembaga Peduli Rakyat Indonesia Provsu	Kepala SMK Negeri 1 Balige Kab. Toba	25/KIP- SU/S/VII/2024	Tanggal : 13 Agustus 2024 Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi
41	DPD LSM Lembaga Peduli Rakyat Indonesia Provsu	Kepala SMA Negeri 1 Tarutung Kab. Tapanuli Utara	26/KIP- SU/S/VII/2024	Tanggal : 13 Agustus 2024 Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi
42	Pasti Tua Siregar	Kepala Kementerian Agama Kab. Padang Lawas	27/KIP- SU/S/VII/2024	Tanggal : 24 September 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi
43	DPD LSM Indonesia Public Wacth	Kepala SMK Negeri 2 Pematang Siantar	29/KIP- SU/S/VII/2024	Tanggal : 11 September 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi
44	DPD LSM Indonesia Public Wacth	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun	30/KIP- SU/S/VII/2024	Tanggal : 11 September 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi
45	DPP Pemantau Independen Peduli Pembangunan Nusantara	Kepala Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara	31/KIP- SU/S/VII/2024	Tanggal : 22 Agustus 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya dalam sidang Ajudikasi
46	Nasir Wadiansan Harahap, Ibnul Faried Sitorus dan R. Dian Susetya	Atasan PPID Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Utara	37/KIP- SU/S/VIII/2024	Tanggal : 3 Oktober 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi



47	Muhammad Ahir Gulam	Atasan PPID Desa Lubuk Gonting Kec. Sihapas Barumun Kab. Padang Lawas	39/KIP-SU/S/VIII/2024	Tanggal : 3 Oktober 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi
48	Ilham Saputra Siregar	Atasan PPID Balai Wilayah Sungai Sumatera II	42/KIP-SU/S/VIII/2024	Tanggal : 12 November 2024 Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi
49	Dewi Sartika	Atasan PPID Dinas PU dan Tata Ruang Padang Lawas Utara	48/KIP-SU/S/XI/2024	Tanggal : 3 Desember 2024 Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi
50	Drs. Zulkarnain Ginting	Atasan PPID Bupati Deli Serdang	52/KIP-SU/S/XI/2024	Tanggal : 3 Desember 2024 Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi



2. Penyelesaian Sengketa Informasi Berhasil di Mediasi

No	Pemohon	Termohon	Register	Putusan
1	M. Arifin	Atasan PPID SMK Negeri 1 Kota Binjai	75/KIP-SU/S/XI/2023	Tanggal : 15 Januari 2024 Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi
2	Dewi Sartika	Atasan PPID Dinas Kesehatan Kab. Padang Lawas Utara	78/KIP-SU/S/XII/2023	Tanggal : 15 Januari 2024 Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi
3	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang	07/KIP-SU/S/II/2024	Tanggal : 24 April 2024 Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi
4	DPD LSM Lembaga Peduli Rakyat Indonesia	Kepala SMA Negeri 1 Palipi Kab. Samosir	08/KIP-SU/S/II/2024	Tanggal : 1 April 2024 Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi
5	DPD LSM Lembaga Peduli Rakyat Indonesia	Kepala SMA Negeri 1 Pangururan Kab. Samosir	09/KIP-SU/S/II/2024	Tanggal : 1 April 2024 Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi
6	Law Office and Legal Consultant Aziz & Aziz	Atasan PPID Perumda Tirtanadi Provsu	10/KIP-SU/S/III/2024	Tanggal : 2 April 2024 Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi
7	Andi Khoirul Harahap, Nasir Wardiansan Harahap dan Zulkifli Harahap	Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara	12/KIP-SU/S/III/2024	Tanggal : 22 April 2024 Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi
8	Andi Khoirul Harahap dan Zulkifli Harahap	Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara III	13/KIP-SU/S/III/2024	Tanggal : 20 Mei 2024 Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi
9	Eky Kuswandi	Atasan PPID Dinas Koperasi dan UKM Sumut	21/KIP-SU/S/VI/2024	Tanggal : 2 Juli 2024 Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi
10	Edison Sihombing dan Ahmad Riadi	Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Mandailing Natal	23/KIP-SU/S/VII/2024	Tanggal : 24 Juli 2024 Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi
11	Andi Khoirul Harahap dan	Atasan PPID Kejaksaan Negeri	33/KIP-SU/S/VIII/2024	Tanggal : 12 September 2024 Termohon bersedia



	Ibnul Faried Sitorus	Labuhanbatu		memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi
12	Andi Khoirul Harahap dan Ibnul Faried Sitorus	Atasan PPID Dinas Pertanian Kab. Labuhanbatu Utara	34/KIP-SU/S/VIII/2024	Tanggal : 12 September 2024 Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi
13	Andi Khoirul Harahap, R. Dian Susetya dan Zulkifli Harahap	Atasan PPID Dinas Pertanian Kab. Labuhanbatu	35/KIP-SU/S/VIII/2024	Tanggal : 12 September 2024 Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi
14	Perkumpulan Pemuda Nusantara Jawa Sumatera	Atasan PPID SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan	38/KIP-SU/S/VIII/2024	Tanggal : 10 September 2024 Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi
15	Pasti Tua Siregar, Nasir Wadiansan Harahap dan Zulkifli Harahap	Atasan PPID Polda Sumatera Utara	40/KIP-SU/S/VIII/2024	Tanggal : 24 September 2024 Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi
16	Rico Rinaldy Nainggolan	Atasan PPID Dinas Lingkungan Hidup Kab. Simalungun	41/KIP-SU/S/VIII/2024	Tanggal : 2 Oktober 2024 Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi
17	DPP LSM Indonesia Public Wacth	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih	43/KIP-SU/S/IX/2024	Tanggal : 2 Oktober 2024 Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi
18	DPP LSM Indonesia Public Wacth	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batu Bara	44/KIP-SU/S/IX/2024	Tanggal : 9 Oktober 2024 Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi
19	DPP LSM Indonesia Public Wacth	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang	45/KIP-SU/S/IX/2024	Tanggal : 9 Oktober 2024 Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi
20	Suherly Harahap	Atasan PPID Kantor Gubernur Provsu	47/KIP-SU/S/XI/2024	Tanggal : 26 November 2024 Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi
21	Perkumpulan Pemuda Nusantara Jawa Sumatera	Atasan PPID SD Negeri 106836 Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang	49/KIP-SU/S/XI/2024	Tanggal : 12 Desember 2024 Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi



3. Penyelesaian Sengketa Informasi Gugur

No	Pemohon	Termohon	Register	Putusan
1	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 1 Siborongborong Kec.Siborongborong Kab. Tapanuli Utara	99/KIP-SU/S/XI/2022	19 Februari 2024 Gugur
2	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 2 Siborongborong Kec.Siborongborong Kab. Tapanuli Utara	100/KIP-SU/S/XI/2022	19 Februari 2024 Gugur
3	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 4 Siborongborong Kec.Siborongborong Kab. Tapanuli Utara	101/KIP-SU/S/XI/2022	19 Februari 2024 Gugur
4	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 2 Pagaran Kec.Pagaran Kab. Tapanuli Utara	102/KIP-SU/S/XI/2022	25 Maret 2024 Gugur
5	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 4 Pahae Julu Kec.Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara	103/KIP-SU/S/XI/2022	25 Maret 2024 Gugur
6	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 1 Simangumban Kec. Simangumban Kab. Tapanuli Utara	104/KIP-SU/S/XII/2022	26 Maret 2024 Gugur
7	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 1 Pahae Julu Kec. Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara	105/KIP-SU/S/XII/2022	26 Maret 2024 Gugur
8	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 1 Pahae Jae Kec. Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara	106/KIP-SU/S/XII/2022	26 Maret 2024 Gugur
9	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 2 Purbatua Kec. Purbatua Kab. Tapanuli Utara	01/KIP-SU/S/II/2023	3 April 2024 Gugur
10	DPD Dharma Advokasi Masyarakat Indonesia	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	18/KIP-SU/S/V/2024	8 Juli 2024 Gugur
11	DPD Dharma Advokasi Masyarakat Indonesia	Kepala Puskesmas Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba	19/KIP-SU/S/VI/2024	8 Juli 2024 Gugur



4. Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

No	Pemohon	Termohon	Register	Putusan
1	DPD LSM Indonesia Public Wacth	Kepala SMK Negeri 1 Pematang Siantar	28/KIP-SU/S/VII/2024	15 Agustus 2024 Pencabutan Permohonan PSI
2	DPP Pemantau Independen Peduli Pembangunan Nusantara	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara	32/KIP-SU/S/VII/2024	15 Agustus 2024 Pencabutan Permohonan PSI
3	Nasir Wadiansan Harahap dan Zulkifli Harahap	Atasan PPID Polres Labuhanbatu	36/KIP-SU/S/VIII/2024	23 September 2024 Pencabutan Permohonan PSI
4	DPC Kota Pematangsiantar LSM P-KPK RI	Atasan PPID Pemerintah Walikota Pematangsiantar	46/KIP-SU/S/X/2024	14 November 2024 Pencabutan Permohonan PSI

5. Proses Penyelesaian Sengketa Informasi

No	Pemohon	Termohon	Register	Keterangan
1	Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia	Atasan PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu Utara	50/KIP-SU/S/XI/2024	Proses
2	Ilham Saputra Siregar	Atasan PPID Kepolisian Daerah Sumatera Utara	51/KIP-SU/S/XI/2024	Proses
3	Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia	Atasan PPID Dinas Ketahanan Pangan Kab. Labuhanbatu Utara	53/KIP-SU/S/XI/2024	Proses
4	Kantor Hukum Bash & Rekan	Atasan PPID Kantor Pertanahan Kota Medan	54/KIP-SU/S/XII/2024	Proses
5	Perkumpulan Pemuda Nusantara Jawa Sumatera	Atasan PPID SMK Negeri 1 Lubuk Pakam	55/KIP-SU/S/XII/2024	Proses
6	Waliyono, S.Sos	Atasan PPID Dinas Kominfo Kota Medan	56/KIP-SU/S/XII/2024	Proses
7	PT. Media Revolusi Karawang	Atasan PPID Desa Ujung Teran Kec. Tigalingga Kab. Dairi	57/KIP-SU/S/XII/2024	Proses



6. Jadwal Persidangan

Jadwal Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Kantor Komisi Informasi Provsu

Senin, 25 Maret 2024

NO	PEMOHON	TERMOHON	REGISTER	PUKUL	MAJELIS KOMISIONER
1.	Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 2 Pagaran Kec. Pagaran Kab. Tapanuli Utara	102/KIP-SU/S/XI/2022	09:30 WIB Agenda: Sidang Ke-2 (Pemeriksaan Para Pihak)	1. Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A 2. Muhammad Safii Sitorus, SH, M.I.Kom 3. Dedy Ardiansyah, S.Sos Panitera Pengganti: Ayu Kusuma Ning Dewi, SH
2.	Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 4 Pahae Julu Kec. Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara	103/KIP-SU/S/XI/2022	10:00 WIB Agenda: Sidang Ke-2 (Pemeriksaan Para Pihak)	1. Muhammad Safii Sitorus, SH, M.I.Kom 2. Dedy Ardiansyah, S.Sos 3. Drs. Eddy Syahputra, AS, M.Si Panitera Pengganti: Devi Puspita Sari Daulay, SH
3.	Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 2 Purbatua Kec. Purbatua Kab. Tapanuli Utara	01/KIP-SU/S/II/2023	10:30 WIB Agenda: Sidang Ke-3 (Pemeriksaan Para Pihak)	1. Dedy Ardiansyah, S.Sos 2. Dr. Abd Harris, SH, M.Kn 3. Drs. Eddy Syahputra, AS, M.Si Panitera Pengganti: Devi Puspita Sari Daulay, SH
4.	Rio Darmawan Surbakti	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Prima Indonesia	11/KIP-SU/S/III/2024	11:00 WIB Agenda: Sidang Ke-1 (Pemeriksaan Awal)	1. Dedy Ardiansyah, S.Sos 2. Muhammad Safii Sitorus, SH, M.I.Kom 3. Dr. Abd Harris, SH, M.Kn Mediator: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Panitera Pengganti: Devi Puspita Sari Daulay, SH

Jadwal Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Kantor Komisi Informasi Provsu

Senin, 27 Mei 2024

NO	PEMOHON	TERMOHON	REGISTER	PUKUL	MAJELIS KOMISIONER
1.	Rio Darmawan Surbakti	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Prima Indonesia	11/KIP-SU/S/III/2024	09:00 WIB Agenda: Kesimpulan Pemohon dan Termohon	1. Dedy Ardiansyah, S.Sos 2. Muhammad Safii Sitorus, SH, M.I.Kom 3. Dr. Abd Harris, SH, M.Kn Mediator: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Panitera Pengganti: Devi Puspita Sari Daulay, SH
2.	Pasti Tua Siregar, Nasir Wardiansan Harahap dan Zulkifli Harahap	Kapolda Sumatera Utara	14/KIP-SU/S/III/2024	09:30 WIB Agenda: Sidang Ke-5 (Lanjutan)	1. Drs. Eddy Syahputra, AS, M.Si 2. Dr. Abd Harris, SH, M.Kn 3. Muhammad Safii Sitorus, SH, M.I.Kom Mediator: Dedy Ardiansyah, S.Sos Panitera Pengganti: Ayu Kusuma Ning Dewi, SH
3.	Pasti Tua Siregar	Atasan PPID Komisi Pemilihan Umum Kab. Padang Lawas	01/REG-KIP-SU-PSIP/IV/2024	10:00 WIB Agenda: PUTUSAN	1. Muhammad Safii Sitorus, SH, M.I.Kom 2. Dr. Abd Harris, SH, M.Kn 3. Drs. Eddy Syahputra, AS, M.Si Mediator: Dedy Ardiansyah, S.Sos Panitera Pengganti: Devi Puspita Sari Daulay, SH



**Jadwal Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Kantor Komisi Informasi Provsu
Selasa, 04 Juni 2024**

NO	PEMOHON	TERMOHON	REGISTER	PUKUL	MAJELIS KOMISIONER
1.	DPD Dharma Advokasi Masyarakat Indonesia	Kepala SD Negeri No. 101303 Batu Godang Kec. Angkola Sangkunar Kab. Tapanuli Selatan	16/KIP-SU/S/V/2024	10:00 WIB Agenda: Sidang Ke-3	1. Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A 2. Drs. Eddy Syahputra, AS, M.Si 3. Dedy Ardiansyah, S.Sos Mediator: Muhammad Safii Sitorus, SH, M.I.Kom Panitera Pengganti: Ayu Kusuma Ning Dewi, SH
2.	Rio Darmawan Surbakti	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Prima Indonesia	11/KIP-SU/S/III/2024	10:30 WIB Agenda: Putusan	1. Dedy Ardiansyah, S.Sos 2. Muhammad Safii Sitorus, SH, M.I.Kom 3. Dr. Abd Harris, SH, M.Kn Panitera Pengganti: Devi Puspita Sari Daulay, SH

**Jadwal Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Kantor Komisi Informasi Provsu
Senin, 01 Juli 2024**

NO	PEMOHON	TERMOHON	REGISTER	PUKUL	MAJELIS KOMISIONER
1.	DPD Dharma Advokasi Masyarakat Indonesia	Sekretaris Daeah Kabupaten Tapanuli Selatan	18/KIP-SU/S/V/2024	09:00 WIB Agenda: Sidang Ke-2 Pemeriksaan Para Pihak	1. Muhammad Safii Sitorus, SH, M.I.Kom 2. Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si 3. Dr. Abd Harris, SH, M.Kn Mediator: Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A Panitera Pengganti: Ayu Kusuma Ning Dewi, SH
2.	DPD Dharma Advokasi Masyarakat Indonesia	Kepala Puskesmas Laguboti Kec. Laguboti Kab. Toba	19/KIP-SU/S/VI/2024	09:30 WIB Agenda: Sidang Ke-2 Pemeriksaan Para Pihak	1. Muhammad Safii Sitorus, SH, M.I.Kom 2. Dr. Abd Harris, SH, M.Kn 3. Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Mediator: Dedy Ardiansyah, S.Sos Panitera Pengganti: Devi Puspita Sari Daulay, SH
3.	Frisdarwin Arman Bakti	Kepala SMA Negeri 8 Medan	17/KIP-SU/S/V/2024	10:00 WIB Agenda: Sidang Ke-1 Pemeriksaan Awal	1. Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si 2. Dedy Ardiansyah, S.Sos 3. Muhammad Safii Sitorus, SH, M.I.Kom Mediator: Dr. Abd Harris, SH, M.Kn Panitera Pengganti: Devi Puspita Sari Daulay, SH

Selasa 02 Juli 2024

NO	PEMOHON	TERMOHON	REGISTER	PUKUL	MAJELIS KOMISIONER
1.	Eky Kuswandi	Atasan PPID MAN 2 Model Medan	20/KIP-SU/S/VI/2024	09:00 WIB Agenda: Sidang Ke-1 Pemeriksaan Awal	1. Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A 2. Drs. Eddy Syahputra, AS, M.Si 3. Dedy Ardiansyah, S.Sos Mediator: Muhammad Safii Sitorus, SH, M.I.Kom Panitera Pengganti: Ayu Kusuma Ning Dewi, SH
2.	Eky Kuswandi	Atasan PPID Dinas Koperasi dan UKM Sumut	21/KIP-SU/S/VI/2024	09:30 WIB Agenda: Sidang Ke-1 Pemeriksaan Awal	1. Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si 2. Dedy Ardiansyah, S.Sos 3. Muhammad Safii Sitorus, SH, M.I.Kom Mediator: Dr. Abd Harris, SH, M.Kn Panitera Pengganti: Devi Puspita Sari Daulay, SH
3.	Eky Kuswandi	Atasan PPID PUD Pasar Kota Medan	22/KIP-SU/S/VI/2024	10:00 WIB Agenda: Sidang Ke-1 Pemeriksaan Awal	1. Dedy Ardiansyah, S.Sos 2. Muhammad Safii Sitorus, SH, M.I.Kom 3. Dr. Abd Harris, SH, M.Kn Mediator: Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A Panitera Pengganti: Ayu Kusuma Ning Dewi, SH



Selasa, 20 Agustus 2024

NO	PEMOHON	TERMOHON	REGISTER	PUKUL	MAJELIS KOMISIONER
1.	Perkumpulan Pemuda Nusantara Jawa Sumatera	Atasan PPID SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan	38/KIP-SU/S/III/2024	09:00 WIB Agenda: Sidang Ke-1 (Pemeriksaan Awal)	1. Muhammad Safii Sitorus, SH, M.I.Kom 2. Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si 3. Dr. Abd Harris, SH, M.Kn Mediator: Dedy Ardiansyah, S.Sos Panitera Pengganti: Ayu Kusuma Ning Dewi, SH
2.	Muhammad Ahir Gulam	Atasan PPID Desa Lubuk Gonting Kec. Sihapas Barumun Kab. Padang Lawas	39/KIP-SU/S/III/2024	09:30 WIB Agenda: Sidang Ke-1 (Pemeriksaan Awal)	1. Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si 2. Muhammad Safii Sitorus, SH, M.I.Kom 3. Dedy Ardiansyah, S.Sos Mediator: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Panitera Pengganti: Devi Puspita Sari Daulay, SH
3.	Pasti Tua Siregar	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas	27/KIP-SU/S/III/2024	10:30 WIB Agenda: Sidang Ke-2 (Pemeriksaan Para Pihak)	1. Muhammad Safii Sitorus, SH, M.I.Kom 2. Dr. Abd Harris, SH, M.Kn 3. Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Mediator: Drs. Eddy Syahputra, AS, M.Si Panitera Pengganti: Devi Puspita Sari Daulay, SH

Senin, 23 September 2024

NO	PEMOHON	TERMOHON	REGISTER	PUKUL	MAJELIS KOMISIONER
1.	Muhammad Ahir Gulam	Atasan PPID Desa Lubuk Gonting Kec. Sihapas Barumun Kab. Padang Lawas	39/KIP-SU/S/III/2024	09:00 WIB Agenda: Lanjutan/Putusan	1. Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si 2. Muhammad Safii Sitorus, SH, M.I.Kom 3. Dedy Ardiansyah, S.Sos Mediator: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Panitera Pengganti: Devi Puspita Sari Daulay, SH
2.	Rico Rinaldy Nainggolan	Atasan PPID Dinas Lingkungan Hidup Kab. Simalungun	41/KIP-SU/S/III/2024	09:30 WIB Agenda: Sidang Ke-2 (Pemeriksaan Para Pihak)	1. Dedy Ardiansyah, S.Sos 2. Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A 3. Dr. Abd Harris, SH, M.Kn Mediator: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Panitera Pengganti: Devi Puspita Sari Daulay, SH
3.	Ilham Saputra Siregar	Atasan PPID Balai Wilayah Sungai Sumatera II	42/KIP-SU/S/III/2024	10:00 WIB Agenda: Sidang Ke-1 (Pemeriksaan Awal)	1. Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A 2. Dr. Abd Harris, SH, M.Kn 3. Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Mediator: Muhammad Safii Sitorus, SH, M.I.Kom Panitera Pengganti: Ayu Kusuma Ning Dewi, SH

**Jadwal Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Kantor Komisi Informasi Provsu
Rabu, 02 Oktober 2024**

NO	PEMOHON	TERMOHON	REGISTER	PUKUL	MAJELIS KOMISIONER
1.	DPP LSM Indonesia Public Wacht	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih	43/KIP-SU/S/IX/2024	09:00 WIB Agenda: Sidang Ke-1 (Pemeriksaan Awal)	1. Muhammad Safii Sitorus, SH, M.I.Kom 2. Drs. Eddy Syahputra, AS, M.Si 3. Dr. Abd Harris, SH, M.Kn Mediator: Dedy Ardiansyah, S.Sos Panitera Pengganti: Devi Puspita Sari Daulay, SH
2.	DPP LSM Indonesia Public Wacht	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batu Bara	44/KIP-SU/S/IX/2024	09:30 WIB Agenda: Sidang Ke-1 (Pemeriksaan Awal)	1. Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si 2. Muhammad Safii Sitorus, SH, M.I.Kom 3. Dr. Abd Harris, SH, M.Kn Mediator: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Panitera Pengganti: Ayu Kusuma Ning Dewi, SH
3.	DPP LSM Indonesia Public Wacht	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang	45/KIP-SU/S/IX/2024	10:00 WIB Agenda: Sidang Ke-1 (Pemeriksaan Awal)	1. Muhammad Safii Sitorus, SH, M.I.Kom 2. Dedy Ardiansyah, S.Sos 3. Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Mediator: Dr. Abd Harris, SH, M.Kn Panitera Pengganti: Devi Puspita Sari Daulay, SH
4.	Rico Rinaldy Nainggolan	Atasan PPID Dinas Lingkungan Hidup Kab. Simalungun	41/KIP-SU/S/III/2024	10:30 WIB Agenda: MEDIASI	1. Dedy Ardiansyah, S.Sos 2. Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A 3. Dr. Abd Harris, SH, M.Kn Mediator: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Panitera Pengganti: Devi Puspita Sari Daulay, SH

7. Foto Persidangan



Sidang Ajudikasi Nonlitigasi antara M. Ikhwan, SE, dkk sebagai Pemohon terhadap Atasan PPID Desa Dolok Masango Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Termohon



Sidang Ajudikasi Nonlitigasi antara Herry Dani Lubis sebagai Pemohon terhadap Atasan PPID KPU Kota Binjai sebagai Termohon



Sidang Ajudikasi Nonlitigasi antara Frisdarwin Arman Bakti sebagai Pemohon terhadap Kepala SMA Negeri 8 Medan sebagai Termohon



Sidang Ajudikasi Nonlitigasi antara Eky Kuswandi sebagai Pemohon terhadap Atasan PPID MAN 2 Model Medan sebagai Termohon



Sidang Mediasi antara Eky Kuswandi sebagai Pemohon terhadap Atasan PPID Dinas Koperasi dan UKM Sumut sebagai Termohon



Sidang Putusan antara Eky Kuswandi sebagai Pemohon terhadap Atasan PPID PUD Pasar Kota Medan sebagai Termohon



Sidang Mediasi (berhasil) antara Edison Sihombing dan Ahmad Riadi sebagai Pemohon terhadap Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Mandailing Natal sebagai Termohon



Sidang Ajudikasi Nonlitigasi (gabungan) antara DPD LSM Lembaga Peduli Rakyat Indonesia sebagai Pemohon terhadap Termohon:

1. Kepala SMK Negeri 1 Pakkat Kab. Humbang Hasundutan
2. Kepala SMK Negeri 1 Balige Kab. Toba
3. Kepala SMA Negeri 1 Tarutung Kab. Tapanuli Utara



Sidang Ajudikasi Nonlitigasi antara Pasti Tua Siregar sebagai Pemohon terhadap Kepala Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas sebagai Termohon



Sidang Ajudikasi Nonlitigasi antara DPD LSM Indonesia Public Wacth sebagai Pemohon terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sebagai Termohon



Sidang Mediasi (berhasil) antara Perkumpulan Pemuda Nusantara Jawa Sumatera sebagai Pemohon terhadap Atasan PPID SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan sebagai Termohon



Sidang Putusan antara Muhammad Ahir Gulam sebagai Pemohon terhadap Atasan PPID Desa Lubuk Gonting Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas sebagai Termohon



Sidang Ajudikasi Nonlitigasi antara Pasti Tua Siregar, Nasir Wadiansan Harahap dan Zulkifli Harahap sebagai Pemohon terhadap Atasan PPID Polda Sumatera Utara sebagai Termohon



Sidang Mediasi (berhasil) antara Rico Rinaldy Nainggolan sebagai Pemohon terhadap Atasan PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun sebagai Termohon



Sidang Ajudikasi Nonlitigasi antara Ilham Saputra Siregar sebagai Pemohon terhadap Atasan PPID Balai Wilayah Sungai Sumatera II sebagai Termohon



Sidang Mediasi (berhasil) antara DPP LSM Indonesia Public Watch sebagai Pemohon terhadap Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih sebagai Termohon



Sidang Mediasi (berhasil) antara Suherly Harahap sebagai Pemohon terhadap Atasan PPID Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara sebagai Termohon



Sidang Ajudikasi Nonlitigasi antara Perkumpulan Pemuda Nusantara Jawa Sumatera sebagai Pemohon terhadap Atasan PPID Negeri 106836 Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupataen Deli Serdang sebagai Termohon

B. LAPORAN KELEMBAGAAN, SOSIALISASI, EDUKASI DAN ADVOKASI

Selama periode kerja komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, selain penyelesaian sengketa informasi yang menjadi tupoksi utama dari komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, komisioner juga telah melaksanakan berbagai agenda kerja yang terkait dengan kelembagaan, sosialisasi, advokasi dan edukasi, yakni: melakukan bimbingan teknis, sosialisasi dan edukasi kepada berbagai OPD, Pemerintah Kabupaten, Perguruan Tinggi dan stakeholder lainnya dilingkungan Provinsi Sumatera Utara, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Audiensi dan koordinasi juga dilaksanakan dengan tujuan untuk penguatan kelembagaan, melakukan berbagai diskusi, kunjungan kerja ke beberapa dinas dan juga menjalin kerjasama dengan Badan Publik sebagai bentuk kolaborasi bersama dalam mengawal keterbukaan informasi di Provinsi Sumatera Utara.

1. Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Edukasi

- 1.1. Bimbingan Teknis (Bimtek)
 - a. Bimbingan Teknis Jurnalistik



Balige - Jumat, 13 Desember 2024 Komisioner Komisi Informasi Provsu Muhammad Safii Sitorus, SH, M.I.Kom (Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi) menjadi Narasumber pada Kegiatan Bimbingan Teknis Jurnalistik untuk mewujudkan jurnalis cerdas, dinamia, kritis dan berkarakter bagi Media Elektronik dan Non Elektronik di Balige Beach Hotel Lumban Bulbul Balige Kabupaten Toba.

b. Bimbingan Teknis Sinergitas Kader Posyandu dan PKK Kabupaten Labuhanbatu Utara



Selasa, 17 Desember 2024 Dr. Abdul Harris Nasution, SH, M.Kn (Ketua Komisi Informasi Provsu) menjadi Narasumber pada Kegiatan Bimbingan Teknis Sinergitas Kader Posyandu dan PKK Kabupaten Labuhanbatu Utara T.A 2024 di Hotel Le Polonia Medan.

1.2. Sosialisasi

a. Sosialisasi ke Pemerintah Kota Pematangsiantar



Ketua Komisi Informasi Provsu Dr. Abdul Harris Nasution, SH, M.Kn dan Ketua Divisi Kelembagaan Dr. Cut Alma Nuraflah, MA menjadi Narasumber Sosialisasi Penerapan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Dinas Kominfo Kota Pematangsiantar Kamis

(22/2/2024) Dalam kegiatan ini dibuka langsung oleh Walikota Siantar Ibu dr. Susanti beserta Jajaran dinas Kominfo siantar.

b. Sosialisasi di Desa Secanggang Kabupaten Langkat



Komisi Informasi Sumut minta Kepala Desa Secanggang segera membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai bentuk kepatuhan terhadap UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2010. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Sumut Drs Eddy Syahputra AS, MSi ketika memberikan pembekalan kepada aparatur Pemerintah Desa (Pemdes) Secanggang, Kamis (16/5/2024) di Aul Kantor Desa Secanggang , Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

Dijelaskan Eddy keberadaan PPID sangat penting dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik khususnya di Desa Secanggang, karena Tugas dan Fungsi (Tupoksi) PPID adalah mengumpulkan, mengolah data dan informasi publik serta melakukan pelayanan terhadap permohonan informasi publik serta mengikuti persidangan dalam penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi. “Begitu pentingnya keberadaan PPID bagi badan publik khususnya di Desa Secanggang karena Tupoksi PPID mengumpul, mengola data dan informasi publik serta melayani permohonan informasi publik sekaligus mengikuti persidangan penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi,” kata Eddy kembali.

Sementara itu Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Komisi Informasi Sumut Syafii Sitorus menambahkan khusus untuk tata kelola pelaksanaan pelayanan Informasi Publik maka Komisi Informasi Pusat sudah

mengeluarka Peraturan Komisi Informasi (Perki) No 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa. “Isi dari Perki No 1 Tahun 2018 itu adalah memerintahkan kepala desa untuk membentuk PPID dan perangkatnya serta membuat aturan teknis kerja PPID tersebut. Di dalam Perki No 1 Tahun 2018 itu juga dengan tegas dan jelas disebut mana informasi publik yang harus disampaikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah informasi tentang Anggaran Dana Desa (ADD). ADD ini harus diumumkan di media-media yang bisa diakses oleh masyarakat seperti di baliho milik desa,” kata Syafii kembali.

Menanggapi hal itu Kades Secanggang T. Syaiful Anhar berjanji akan segera membentuk PPID dan sekaligus membentuk Tim PPID agar bisa melayani masyarakat yang memohon informasi publik.

c. Sosialisasi PPID di Desa se Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan



Kepala Desa (Kades) se Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan diminta untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai bentuk implelementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi (Perki) No 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi Informasi Sumut Safii Sitorus Jumat (21/6/2024) ketika menjadi pembicara pada kegiatan Penguatan Literasi Bagi Pemesdes se Kecamatan Tinggi Raja, di Aula Kantor Camat Tinggi Raja. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Camat Tinggi Raja Rahmat Hidayat Rambe SIP itu diikuti oleh seluruh Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta perwakilan UPT yang ada di Kecamatan Tinggi Raja. Safii menuturkan bahwa ujung tombak pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 itu adalah PPID oleh karena itu Kepdes diminta untuk segera membentuk PPID agar pelayanan terhadap pemohon informasi bisa berjalan dengan baik.

d. Sosialisasi pemanfaatan teknologi berbasis digital desa



Kamis, 18 Juli 2024 Dr. Cut Alma Nuraflah, MA (Kadiv Kelembagaan) menjadi narasumber Pelatihan pemanfaatan teknologi berbasis digital desa (pengembangan website desa) di Kantor Desa Sigumpar Kabupaten Toba.

e. Sosialisasi Keterbukaan Informasi

Jum'at, 2 Agustus 2024, Dedy Ardiansyah, S.Sos (Ketua Divisi Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi) menjadi Narasumber pada kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi di Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara.





f. Sosialisasi Desa Digital di Desa Skip Kec. Lubuk Pakam



22 Oktober 2024, Dr. Abdul Harris Nasution, SH, M.Kn (Ketua Komisi Informasi Provsu) dan Dr. Cut Alma Nurafлах, MA (Kadiv Kelembagaan) menjadi Narasumber dalam Kegiatan Sosialisasi Desa Digital di Desa Skip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang.

g. Sosialisasi di Kantor Pertanahan Kota Medan



Jumat, 6 Desember 2024, Ketua Komisi Informasi Provsu Dr. Abdul Harris Nasution, SH, M.Kn menjadi Narasumber pada kegiatan sosialisasi pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan pada kantor pertanahan kota medan tahun 2024.

h. Sosialisasi Keterbukaan Informasi



Samosir - Kamis, 12 Desember 2024 Komisioner Komisi Informasi Provsu Dedy Ardiansyah, S.Sos (Ketua Divisi Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi) menjadi Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi dalam Peran Pemerintah Desa dalam mendukung Program Asta Cita melalui Visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2025 di Hotel Labersa Samosir.

1.3. Edukasi

a. Coaching Clinic di Diskominfo Toba

Coacing Clinic diberikan langsung Wakil Ketua KI Sumut Eddy Syahputra Sormin di dampingi oleh Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi Syafi'i Sitorus kepada Kabid PIKP Diskominfo Toba Rikkardo Simamora. Eddy Sormin panggilan akrab bagi Komisioner KI Sumut dua periode itu menjelaskan bahwa hal yang paling penting untuk mencegah terjadinya sengketa informasi adalah mempersiapkan SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mumpuni yakni yang mengerti dan memahami UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta aturan teknisnya.



Selanjutnya sebut Eddy melaksanakan apa yang diperintahkan dalam UU No 14 Tahun 2008 itu yakni menyiapkan tiga jenis informasi yang mudah diakses masyarakat seperti di *website*. “Tiga jenis informasi yang wajib disediakan badan publik itu adalah Informasi yang tersedia setiap saat, Informasi Berkala dan Informasi serta merta,” kata Eddy kembali. Salah satu contoh sebut Eddy adalah dalam waktu dekat ini Pemkab Toba akan melaksanakan event Internasional F1 Powerboat Tahun 2024 seluruh informasi kegiatan ini harus tersampaikan ke publik dengan baik agar masyarakat bisa mengetahui tahapan perkembangan kegiatan F1 Powerboat tersebut.

“Selain itu perlu dilakukan penyempurnaan dan peningkatan sarana dan prasarana bagi PPID di jajaran Pemkab Toba agar pelayanan terhadap pemohon informasi bisa lebih baik. Kabid PIKP Diskominfo Toba Rikkardo Simamora menegaskan akan menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh KI Sumut agar tidak terjadi sengketa informasi di Pemkab Toba. Rikkardo juga memperlihatkan ruangan PPID Pemkab Toba, ruang Radio Pemkab Toba dan Media Centre Pemkab Toba. Kamis, 22 Februari 2024 Ketua Komisi Informasi Dr. Abd. Harris Nasution, SH, M.Kn dan Ketua Divisi Kelembagaan Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A menjadi narasumber acara Sosialisasi Penerapan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Dinas Kominfo Kota Pematang Siantar.

b. Penguatan PPID di Kabupaten/Kota

Rabu - Jumat, 6 – 8 Maret 2024, Komisioner Komisi Informasi Provsu melaksanakan Kunjungan Kerja ke Badan Publik dalam rangka membina hasil monitoring dan evaluasi pada tahun 2023 yang mana komisioner berharap untuk PPID di badan publik tetap di tingkatkan dan sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun Kunjungan Kerja yang di kunjungi adalah Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, KPU Asahan, KPU Batubara, Kominfo Tanjung Balai, Komisioner juga menyebutkan pelayanan permohonan informasi publik di Badan Publik harus terus ditingkatkan khususnya terkait permohonan informasi publik yang dilakukan secara online melalui PPID agar operator yang memantau permohonan informasi secara online itu bisa terlayani sesuai dengan prosedur waktu yang sudah ditetapkan.



Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu



Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara



KPU Kabupaten Asahan



KPU Kabupaten Batubara

c. Penguatan PPID di Kabupaten/Kota

Kamis - Jumat, 25-26 April 2024 Komisioner Komisi Informasi Provsu melaksanakan Kunjungan Kerja ke Badan Publik dalam rangka membina hasil monitoring dan evaluasi pada tahun 2023 yang mana komisioner berharap untuk PPID di badan publik tetap di tingkatkan dan sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun Kunjungan Kerja yang di kunjungi adalah KPU Batubara, Desa dan Kominfo Deli Serdang dan Kominfo Kab. Serdang Bedagai, KPU Siantar.



Dinas Kominfo Kab. Deli Serdang



Desa Bangun Rejo, Tj. Morawa Kab. Deli Serdang



Dinas Kominfo Kab. Serdang Bedagai

d. Podcast Keterbukaan Informasi Pilkada Sumut Tahun 2024



Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, Agus Arifin, mendukung penuh dimasukkannya Keterbukaan Informasi Publik sebagai materi dalam debat kandidat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara

(Cagubsu-Cawagubsu) 2024. Agus menyatakan pandangannya tersebut setelah mengikuti Podcast di Universitas Darma Agung Medan, Kamis (3/10/2024), yang membahas Keterbukaan Informasi dalam tahapan Pilkada 2024.

Ketua Komisi Informasi Sumut, Dr. Abd Harris SH, MKn, juga sejalan dengan pandangan Agus. Harris menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik sangat penting dalam menciptakan pemerintah yang bersih. Ia berharap materi ini dapat menjadi salah satu fokus utama dalam debat Cagubsu dan Cawagubsu mendatang. “Komitmen kepala daerah dalam keterbukaan informasi adalah kunci mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Para kandidat perlu memahami aturan terkait ini agar bisa diimplementasikan dengan baik,” ujar Harris.

e. Penguatan KIP bagi PPID Desa di Pemkab Serdang Bedagai



Dr. Abdul Harris Nasution, SH, M.Kn (Ketua KI Provsu) dan M. Safii Sitorus, SH (Ketua Divisi PSI) menjadi Narasumber pada kegiatan penguatan KIP bagi PPID Desa di Pemkab Serdang Bedagai, Selasa (28/5/2024).

f. Narasumber Rakor SIBER



Rabu, 23 Oktober 2024,
Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si (Wakil Ketua Komisi Informasi Provsu) dan M. Safii Sitorus, SH, M.I.Kom (Kadiv Penyelesaian Sengketa Informasi) menjadi Narasumber dalam Kegiatan Rapat Koordinasi SIBER dan Fungsi Kehumasan pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Hotel Grand Singgie Kota Tanjungbalai.



2. Kegiatan Komisi Informasi, Audiensi dan Koordinasi

2.1. Kegiatan Komisi Informasi

a. Kunjungan Kerja dari Komisi Informasi Provinsi Riau



Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara beserta Komisioner menerima Kunjungan dari Komisi Informasi Provinsi Riau dalam Kegiatan FGD/Diklat pemantapan sumber daya manusia (SDM) dalam keterbukaan informasi menurut amanat undang undang KIP.

b. Kunjungan dari Kanwil Kemenag Provsu

Jajaran Humas Data dan Informasi (HDI) Kanwil Kemenag Sumut konsultasi tentang Tata Kelola Informasi Publik ke Komisi Informasi Sumut, Selasa (6/2/2024) di Jalan Al Falah Sukamaju Medan. Dipimpin langsung Katim Mulia Banurea SAg, MSi Tim HDI Kemenag Sumut ini ingin mengetahui sekaligus akan menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008. "Kehadiran kami ke Komisi Informasi Sumut ini untuk berkonsultasi sekaligus ingin mendapatkan bimbingan dan masukan apa yang harus kami lakukan untuk menerapkan keterbukaan informasi publik ini sehingga jajaran Kemenag Sumut lebih baik lagi dalam menyampaikan informasi publik kepada masyarakat," kata Mulia. Mulia menjelaskan kami juga ingin mengetahui bagaimana Tata Kelola Informasi Publik yang akan kami terapkan juga di unit jajaran Kemenag Sumut.



Menanggapi hal itu Ketua Komisi Informasi Sumut Dr Abdul Harris SH, M.Kn menyambut baik kedatangan Tim HDI Kemenag Sumut yang dipimpin oleh Mulia Banurea ke Komisi Informasi Sumut karena ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang sudah dilakukan pada Desember 2023 lalu.

c. Kunjungan Kerja dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat



Kamis, 29 Februari 2024 Wakil Ketua Komisi Informasi Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si dan komisioner lainnya yakni Dedy Ardiansyah S.Sos dan Syafii Sitorus SH, M.I.Kom beserta staf menerima Kunjungan Ketua Komisi Informasi (KI) Jawa Barat Dr Ijang Faisal dan rombongan ke Komisi Informasi Sumut dalam rangka studi tour Kelembagaan dan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI). Edy menyampaikan antara Komisi Informasi Sumut dan Komisi Informasi Jabar saat ini saling bertukar pengalaman tentang pengelolaan kelembagaan yang lebih baik dan PSI sehingga penyelesaian sengketa informasi bisa jauh lebih cepat sederhana dan berbiaya murah.

d. Kunjungan dari Kominfo Serdang Bedagai



Rabu, 13 Maret 2024 Kunjungan dari Kominfo Serdang Bedagai dalam rangka untuk menjadi peserta dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).

e. Kunjungan Kerja ke Kominfo Tapteng dan Kominfo Sibolga



Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah



Pemerintah Kota Sibolga

Selasa-Rabu, 25-26 Juni 2024, Komisioner Komisi Informasi Provsu beserta Staf kunjungan kerja ke Pemkab Tapteng dan Pemko Sibolga yang dalam hal ini disambut baik dengan para jajaran Kominfo.

f. Acara Sidang Tim Pengendali Mutu (TPM)



Komisioner Komisi Informasi Provsu (Dr. Abdul Harris Nst, SH, M.Kn) Menghadiri Acara Sidang Tim Pengendali Mutu (TPM) untuk pembahasan Kajian dengan judul “Ketersediaan Sumber Daya Manusia, Saranan Prasarana dan Anggaran Komisi Informasi (KI) Sumatera Utara” di Kantor Bappelitbang Provsu Selasa, 25 Juni 2024.

g. Pencanaan Zona Integritas di BPS Provsu



Jum'at, 20 September 2024 Ketua Komisi Informasi Provsu (Dr. Abd Harris Nst, SH, MKn) menghadiri acara “Pencanangan Zona Integritas” dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provsu di Aula Lt. 5 Kantor BPS Provsu Jalan Asrama No. 179 Medan. Acara dihadiri Ibu Dra. Manna Wasalwa Lubis, MAP, mewakili Sekda Provsu, Sekretaris BALITTBANG Provsu, Dr. Dicky, Kakanwil DJPb, Bulog, OJK, BI BPK Perwakilan Sumut, Ombudsman Sumut, Kejatisu dan pejabat daerah lain. Kepala BPS Provsu, Asim Saputra, SST, M.Ec.Dev) akan melaksanakan berbagai program baru untuk mencapai Zona Integritas “WBK/WBBM”.

h. Kunjungan Kerja ke Komisi Informasi Provinsi Bali



Ketua Divisi Kelembagaan Dr. Cut Alma Nuraflah, MA menghadiri undangan Focus Group Discussion (FGD) dalam mengoptimalkan layanan informasi publik dan penetapan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa Pengadaan Barang/Jasa sebagai unsur penting dalam implementasi Keterbukaan

Informasi Publik dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.



i. Kunjungan Kerja dari Komisi Informasi Provinsi Aceh



Ketua Komisi Informasi Sumut Dr. Abdul Harris Nasution, SH, M.Kn menerima Kunjungan dari Komisi Informasi Provinsi Aceh dalam rangka penguatan kelembagaan dan penyelesaian sengketa informasi di Kantor Komisi Informasi Provsu (5/11/2024).

j. Presentasi Monev Keterbukaan Informasi



14 November 2024 Ketua Komisi Informasi Provsu Dr. Abdul Harris Nasution, SH, M.Kn mendampingi Pj. Gubernur Sumut melaksanakan Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat.

k. Menghadiri Peluncuran Tahapan Pilkada Batubara



Ketua Komisi Informasi Sumut Dr Abdul Harris Nasution, SH, M.Kn imbau KPU Batubara untuk memasukkan materi Keterbukaan Informasi Publik dalam debat kandidat Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Pilkada Batubara yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Harris ketika menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri Peluncuran Tahapan Pilkada Kabupaten Batubara Rabu (29/5/2024) di Conventionhall Singaporland Batubara. Harris juga menegaskan tidak hanya untuk KPU Batubara saja, kami menghimbau seluruh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Sumut yang melaksanakan Pilkada agar memasukkan materi Keterbukaan Informasi Publik dalam debat kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah agar masyarakat tahu bagaimana komitmen mereka dalam melaksanakan amanah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



I. Menghadiri Undangan ke Komisi Informasi



Menghadiri acara Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa 2024 di Jakarta dan Menghadiri Kegiatan Koordinasi Rancangan Perubahan Peraturan Penyelesaian Sengketa Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 28 - 29 November 2024.

m. Rapat dengan Komisi A DPRD Provsu



Kamis, 5 Desember 2024, Komisioner Komisi Informasi Rapat dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara dan para Jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

n. Kunjungan Kerja ke Komisi Informasi Pusat RI



Ketua Komisi Informasi Sumut Dr. Abd Harris Nasution, SH, M.Kn dan Ketua Divisi Kelembagaan Dr. Cut Alma Nurafiah, MA, kunjungan kerja Komisi A DPRD Provsu bersama Sekretariat DPRD Provsu ke DPRD Provinsi DKI Jakarta dan bersama Dinas Kominfo Provsu ke Komisi Informasi Pusat RI di Jakarta dalam rangka Penguatan Keterbukaan informasi publik di Komisi Informasi.

o. Anugerah Award Komisi Informasi Pusat



Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara mendampingi Pj. Gubsu dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 kualifikasi Informatif. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menerima langsung penghargaan

tersebut pada acara Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Penghargaan diserahkan langsung Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Pusat, Syawaludin. Anugerah Keterbukaan Informasi diberikan oleh Komisi Informasi kepada Badan Publik yang telah berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Usai menerima penghargaan, Fatoni menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas pemberian penghargaan tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras dan sinergitas seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Fatoni mengatakan penghargaan ini juga merupakan bukti meningkatnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik Pemprov Sumut kepada masyarakat.

Keterbukaan informasi merupakan hal yang wajib dilakukan seluruh badan publik yang ada di Indonesia. Ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengawasi kinerja pemerintah serta membantu mereka mendapatkan informasi yang kredibel. “Kewajiban kita untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik karena ini akan berdampak pada pengawasan masyarakat ke pemerintah, memberikan mereka informasi yang kredibel, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan lainnya,” kata Fatoni. Pemprov Sumut meraih nilai 91,91 poin untuk kategori provinsi, kualifikasi informatif untuk Keterbukaan Informasi Publik 2024.

2.2. Audiensi

a. Audiensi dengan Sekretaris Bawaslu Sumut



terkait keterbukaan informasi publik pada penyelenggaraan seluruh Tahapan Pemilu Tahun 2024.

Rabu, 3 Januari 2024 Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara beraudiensi dengan Bawaslu Sumut yang diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Sumut M. Aswin Diapari Lubis di Kantor Bawaslu Sumut dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi dan berdiskusi

b. Audiensi dengan PTPN 1 Regional 1

Region Head Regional I PTPN I diwakili SEVP Aset Ganda Wiratmaja dan staf menerima audiensi Komisi Informasi Sumut Kamis (18/1/2024) di ruang Tebu Regional I PTPN I (dulu PTPN II) di Tanjung Morawa Deli Serdang.



didampingi Wakil Ketua Drs Eddy Syahputra S MSi Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Syafii Sitorus SH,MIKom mengucapkan terimakasih telah diterima beraudiensi dengan pihak Regional PTPN I yang sebelumnya kita mengenal ini adalah PTPN II tentu dengan audiensi ini kami bisa mendapatkan informasi terkait perubahan nomenklatur yang ada saat ini apalagi kami mendengar sudah ada penyatuan antara PTPN yang ada saat ini.

Harris juga menyebutkan bahwa Keterbukaan Informasi Publik terkait sejumlah aset di bawah naungan Region Head Regional I perlu diketahui oleh masyarakat agar tidak terjadi lagi konflik antara masyarakat dengan pihak Region Head Regional I. Dijelaskan Harris meski di dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik itu ada informasi yang dikecualikan kami berharap agar ini tidak dijadikan dalih untuk menutup akses informasi publik kepada masyarakat sebab dalam kategori informasi yang dikecualikan itu hanya segelintir saja dikategorikan informasi dikecualikan.

c. Audiensi dengan PTPN IV Regional I & II



Ketua Komisi Informasi Sumut Dr Abd Harris SH, M.Kn didampingi Wakil Ketua Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si dan Anggota Dr. Cut Alma Nuraflah, MA dan M. Safii Sitorus SH, M.I.Kom audiensi dengan PTPN IV Regional I & II. Harris menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan Region Head Regional I dan II terungkap bahwa saat ini mereka tengah menunggu kepastian susunan struktur organisasi yang definitif di Regional I dan II itu termasuk sampai saat ini PPID nya belum terbentuk padahal PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi publik di badan publik.

“Inti dari audiensi itu adalah bahwa sampai saat PPID di Regional I dan II PTPN IV belum dibentuk. Berdasarkan keterangan pihak Regional I dan II karena sampai saat ini struktur atau organisasi di dua regional itu belum definitif masih berubah-ubah. Padahal PPID merupakan salah satu hal yang penting dalam rangka menunjukkan kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” sebut Harris.

Sebelumnya Komisi Informasi diterima oleh pihak Region Head Regional I PTPN IV yang diwakili oleh bagian Humas Edy Lesmana dan staf Humas dan Protokorel Fariz dan Roni. Sementara di Region Head Regional II yang diwakili oleh staf Humas Kunto Aji, Bobby Saragih dan Galih.

d. Audiensi dengan Pengadilan Tinggi Medan



Kamis, 25 Januari 2024, Ketua Komisi Informasi Provsu didampingi Komisioner KI Sumut beserta staf audiensi dengan Pengadilan Tinggi Medan.

e. Audiensi dengan Kepala Bappelitbang Sumut



Jumat (15/3/2024), Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan (Bappelitbang) Sumut dan Komisi Informasi Sumut akan melakukan kajian tentang literasi dan implementasi keterbukaan informasi di Badan Publik yang ada di Sumut. Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Kepala Bappelitbang Sumut Ir. Alfi Syahri Harahap dan Ketua Komisi Informasi Sumut Dr. Abd. Harris, SH, M.Kn di ruang kerja kepala Bappelitbang Sumut Jalan P. Diponegoro Medan.

f. Audiensi dengan Pj. Gubernur Sumatera Utara

Jumat, 22 Maret 2024 Komisioner Komisi Informasi Provsu Dr. Abd Harris Nst, SH, Mkn (Ketua) didampingi Drs. Eddy Syahputra AS, Msi (Wakil Ketua), M. Syafii Sitorus, SH (Kadiv PSI), Deddy Ardiansyah (Kadiv ASE) menyampaikan

laporan tahunan 2023 kepada Pj. Gubernur Sumatera, di Kantor Gubsu Jln. P Diponegoro No. 30 Medan.



Penyerahan tersebut yang diterima langsung oleh Bapak Hassanudin selaku Pj. Gubsu turut dihadiri Kadis Kominfo Provsu Ilyas Sitorus SE, M.Pd dan Sekretaris Diskominfo Provsu Achmad Yazid Matondang, S.Sos.

Pj. Gubsu tetap mendukung penuh keterbukaan informasi badan publik. Keterbukaan informasi publik adalah hak masyarakat memperoleh informasi agar mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik.

g. Audiensi dengan Ketua DPRD Sumut

Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara usul Inisiatip DPRD Sumut bersama Pemprovsu untuk membahas Ranperda Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini menjadi topik pembahasan dalam penyampaian Laporan Tahunan KI Sumut Tahun 2023 dan Program Tahun 2024 kepada Ketua DPRD Sumut yang baru dilantik, Dr Sutarto di ruang kerja, Rabu (15/5/2024).



Pertemuan ini dihadiri langsung Ketua dan wakil ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Dr Abd. Harris, SH, Mkn dan Drs. Eddy Syahputra AS. M.Si. Turut mendampingi komisioner lainnya M. Safii

Sitorus, SH (Kadiv PSI), Dedy Ardiansyah S.Sos (Kadiv ASE), Dr. Cut Alma Nurafiah, MA (Kadiv Kelembagaan) serta Achmad Yazid Matondang, S.Sos

(Sekretaris) dan tenaga ahli bidang hukum serta staf Dinas Kominfo Sumut. Dalam pertemuan ini Dr. Sutarto yang baru saja dilantik sebagai Ketua DPRD Provsu pada 8 Mei lalu menyambut baik usulan tersebut. Pada kesempatan itu, Abdul Harris



menyampaikan laporan pertanggungjawaban KI Sumut tahunan 2023 dan berharap agar DPRD Sumut mensupport keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU 14 Tahun 2008. Sekaligus mendukung dalam hal anggaran agar kinerja KI Sumut bisa lebih maksimal. Dalam hal ini, Harris juga meminta kepada DPRD Provsu agar segera direalisasikan pembahasan Ranperda Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik tersebut. Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Safii Sitorus, menyebutkan bahwa banyak badan publik di jajaran Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara sampai ke Pemerintahan Desa belum paham UU Keterbukaan Informasi Publik. Justru itu, pemahaman pada Badan Publik wajib sangat penting. Syafii menegaskan bahwa permohonan sengketa informasi khususnya Desa terus meningkat dari tahun ke tahun.

h. Audiensi dengan TVRI Sumut



Komisi Informasi Sumut dan TVRI Stasiun sepakat untuk bersinergi dalam penguatan Literasi Keterbukaan Informasi Publik ke tengah masyarakat.

Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Komisi Informasi Sumut dan pihak TVRI Sumut di ruang rapat TVRI Sumut Selasa (6/8/2024). Hadir dalam pertemuan itu Ketua Komisi Informasi Sumut Dr H Abd Harris Nasution, Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Muhammad Safi'i Sitorus SH, Mkom, Kepala TVRI Sumut diwakili oleh Plh Kasubbag Tata Usaha (KTU) Muhyin, Ketua Perencana dan Pengendali Umum Bustami dan Ketua Perencana dan Pengendali Program dan Penyiaran Tarmizi.

Abd Harris menegaskan penguatan literasi keterbukaan informasi melalui TVRI Sumut sangat membantu agar pimpinan badan publik bisa memahami dan melaksanakan keterbukaan informasi di badan publik yang dipimpinnya. "TVRI jangkauan siarannya sampai ke pelosok daerah akan mudah menyampaikan literasi keterbukaan informasi publik ini khususnya di desa desa yang saat ini banyak terjadi sengketa informasi,' kata Harris.

2.3. Koordinasi

a. Koordinasi Kantor Wilayah Kemenag di Sumatera Utara

Senin - Jumat, 29 April – 3 Mei 2024 Rakord Pengelolaan Kehumasan dan Pengelolaan PPID Kanwil Kemenag Sumut di daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padangsidempuan, Kabupaten Nias, Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Utara.





b. Rapat Koordinasi Nasional ke-15



Komisi Informasi Sumatera Utara hadir Rapat Koordinasi Nasional ke-15 Komisi Informasi Pusat se-Indonesia 2024 dengan tema "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggara Negara Menuju Indonesia Emas 2045" di Banjarmasin 10-13 Juni 2024. Ketua Komisi Informasi Sumut Dr Abd Harris SH MKn menyatakan Rakornas merupakan ajang pertukaran informasi masing masing Komisi Informasi di daerah se Indonesia sekaligus melakukan evaluasi dan membuat program-program baru untuk diambil kebijakan oleh Komisi Informasi Pusat.

"Komisi Informasi Sumut sudah menyampaikan masukan secara tertulis kepada panitia Rakornas khususnya untuk perbaikan bidang kelembagaan dan penyelesaian sengketa informasi salah satunya adalah perbaikan terhadap proses

seleksi calon Anggota Komisi dimana harus dimasukkan salah satu timselnya adalah mantan anggota komisi informasi.

Acara Rakornas Komisi Informasi se Indonesia ini dijamu oleh Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor lewat acara galadiner yang digelar di Mahligai Pancasila Kalsel Senin malam (10/6/2024).

Acara galadiner ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI H Abdul Haris, Ketua Umum PWI Hendry CH Bangun dan seluruh Komisi Informasi se Indonesia. Hadir juga seluruh Anggota Komisi Informasi Sumut yakni Drs. Eddy Syahputra As, M.Si, Muhammad Safii Sitorus, SH, Dr. Cut Alma Nurafilah, MA, Dedi Ardiansyah, S.Sos.

c. Pertemuan dengan WR II dan IV Universitas Medan Area



Medan, Komisi Informasi Sumut dan Universitas Medan Area (UMA) sepakat untuk MOU Keterbukaan Informasi dalam rangka mengembangkan literasi keterbukaan informasi di Kamus UMA dan masyarakat. Hal itu terungkap dalam audiensi Komisi Informasi Sumut ketika beraudiensi dengan Rektor UMUA yang diwakili oleh WR II Dr Dedi Syahputra MA dan WR IV Dr. Rahmad Syah, M.Kom, Senin (27/5/2024). Dalam audiensi itu Ketua Komisi Informasi Sumut Dr. Abdul Harris Nasution, SH, M.Kn didampingi Kadiv PSI M. Safii Sitorus, SH, M.I.Kom. MOU dilakukan dengan pihak Rektor dan MOA akan dilakukan dengan pihak fakultas yang secara teknis nantinya akan melaksanakan komitmen itu.



3. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kembali monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi tahun 2024 yang bertujuan untuk memantau kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana amanah UU No 14 Tahun 2008. Tahapan Monev dimulai dari bulan Juli hingga Desember 2024. Diawali dengan sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang dilakukan pada Selasa, 9 Juli 2024 Melalui Zoom yang difasilitasi oleh Diskominfo di Aula Transpransi Diskominfo Sumut. Dilanjutkan dengan pengisian SAQ melalui Google Form. Setelah di verifikasi oleh tim penilai, penilaian selanjutnya adalah dari presentasi yang dilakukan oleh Badan Publik pada 26 Agustus – 6 September 2024, di Kantor KI Sumut Jalan Alfalah No 22 Kel. Sukamaju Kec. Medan Johor Kota Medan. Setelah tahap presentasi di lanjut dengan visitasi dan acara puncak Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (Penghargaan KI Sumut Award 2024).

Adapun Jumlah Badan Publik, Penilaian Monev (Pengisian SAQ, Presentasi, Visistasi), dan Pemeringkatan Penilaian Monev adalah :

Jumlah Badan Publik Tahun 2024

Badan Publik	Jumlah
Pemerintah Kabupaten / Kota	33
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provsu	33
Instansi Vertikal	11
BUMD	6
Kementerian Agama se-Sumatera Utara	34
Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Sumatera Utara	34
Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWSLU) se-Sumatera Utara	34
Pemerintah Desa	38
TOTAL	223

PENILAIAN MONEV KI SUMUT

**PENGISIAN
SAQ**

• BOBOT NILAI 50 %

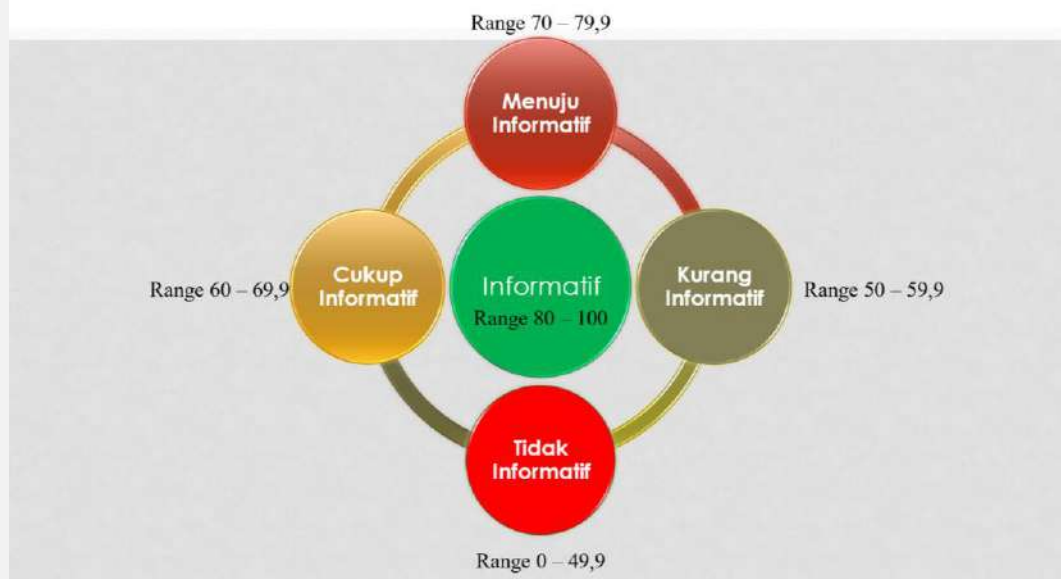
PRESENTASI

• BOBOT NILAI 40 %

VISITASI

• BOBOT NILAI 10 %

PEMERINGKATAN



a. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Monev 2024



Sosialisasi Monev melalui via zoom di aula dinas kominfo

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menggelar kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (bimtek) Monitoring dan Evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara daring di Aula Transparansi Diskominfo Sumut, Selasa (9/7/24).

Bimtek tersebut diikuti 250 peserta yang berasal dari berbagai badan publik di Sumut yang masuk dalam 6 kategori yang akan dimonev oleh KI Sumut seperti

OPD Pemprovsu, Kab/Kota, penyelenggara pemilu, Pemerintahan Desa, BUMD, dan lembaga vertikal.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Dr. Abd Harris Nst SH, Mkn membuka acara tersebut sekaligus memberikan pandangan betapa pentingnya kegiatan ini untuk membuka pikiran dari peserta agar dapat melaksanakan perintah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setelah memahami makna dari UU tersebut tentu akan mudah untuk melayani permohonan informasi dari masyarakat perorangan, lembaga atau badan hukum. “Yang menjadi masalah Badan Publik melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), tidak diberikan hak sepenuhnya tentang apa saja yang menjadi konsumsi publik. Padahal, dalam UU sudah jelas informasi yang dapat dibuka ke publik. Kecuali, informasi yang bersifat rahasia, pribadi dan Hak Kekayaan Intelektual,” kata Haris.

Di sela acara tersebut, Haris juga memberikan berbagai peraturan perundangan yang wajib diketahui oleh peserta. “Ya agar atasan Bapak/Ibu itu diberikan pengetahuan juga. Janganlah ngurus anggaran saja dan mengabaikan peraturan yang berlaku. Nanti kalau ada masyarakat minta informasi tak bisa dijawab maka akan sengketa di Komisi Informasi,” kata Haris. Bahkan, apabila Badan Publik tidak melayaninya maka ada sanksi pidananya.

Selain itu, Haris mengingatkan, setelah acara ini agar peserta menyampaikan kepada atasannya untuk membentuk PPID bagi yang belum membentuknya sesuai Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008.



Bimbingan Teknis Monev melalui via zoom di aula dinas kominfo

b. Presentasi Monev 2024



Presentasi Monev di kantor komisi informasi provsu jl. Alfalah no. 22

Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 diikuti 223 Badan Publik diantaranya yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provsu, Pemerintahan Desa se-Sumatera Utara dan Penyelenggara Pemilu (KPU dan BAWASLU Se-Sumatera Utara, Lembaga Vertikal (Kemenag se-Sumatera Utara dan Instansi Vertikal). Adapun yang mengikuti presentasi Monev Tahun 2024 adalah 29 OPD Provsu dari 33 badan publik OPD, 32 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dari 33 badan publik Pemkab/Pemko, 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provsu dari 6 badan publik BUMD, 18 Pemerintahan Desa se-Sumatera Utara dari 38 badan publik Desa, Penyelenggara Pemilu (30 KPU dari 34 badan publik KPU, 29 BAWASLU dari 34 badan publik BAWASLU), Lembaga Vertikal (25 Kemenag se-Sumatera Utara dari 34 badan publik Kemenag, 5 Instansi vertikal dari 11 badan publik Instansi Vertikal).





Presentasi Badan Publik dalam Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2024



Presentasi Badan Publik dalam Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2024



Presentasi Badan Publik dalam Money Keterbukaan Informasi Tahun 2024



Presentasi Badan Publik dalam Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2024



Presentasi Badan Publik dalam Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2024

c. **Visitasi Monev 2024**

Selanjutnya setelah penilaian presentasi lalu dilakukan visitasi ke Badan Publik terpilih. Hasil akhir dari penilaian monev adalah diberikannya penghargaan keterbukaan informasi dengan kategori Badan Publik Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif.





Visitasi Badan Publik dalam Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2024



Visitasi Badan Publik dalam Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2024

d. Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Monev 2024

Setelah melaksanakan rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan penilaian terhadap Badan Publik yang akan di nilai untuk selanjutnya diadakan acara Puncak Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 yang memperoleh Kategori Informatif. Adapun pelaksanaan tersebut akan diadakan pada Senin, 9 Desember 2024 di Aula Raja Inal Siregar Lt. 2 Kantor Gubernur Sumatera Utara Jl. P. Diponegoro Medan.



Kata sambutan Ketua KI Provsu



Kata sambutan Pj. Gubernur Sumut



Penerima Penghargaan Award Desa



Penerima Penghargaan Award BUMD dan Lembaga Vertikal



Penerima Penghargaan Award KPU dan Bawaslu se-Sumatera Utara



Penerima Penghargaan Award OPD Provsu



Penerima Penghargaan Award Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara



Pj.Gubernur Sumatera Utara menerima Penghargaan Achievement Award

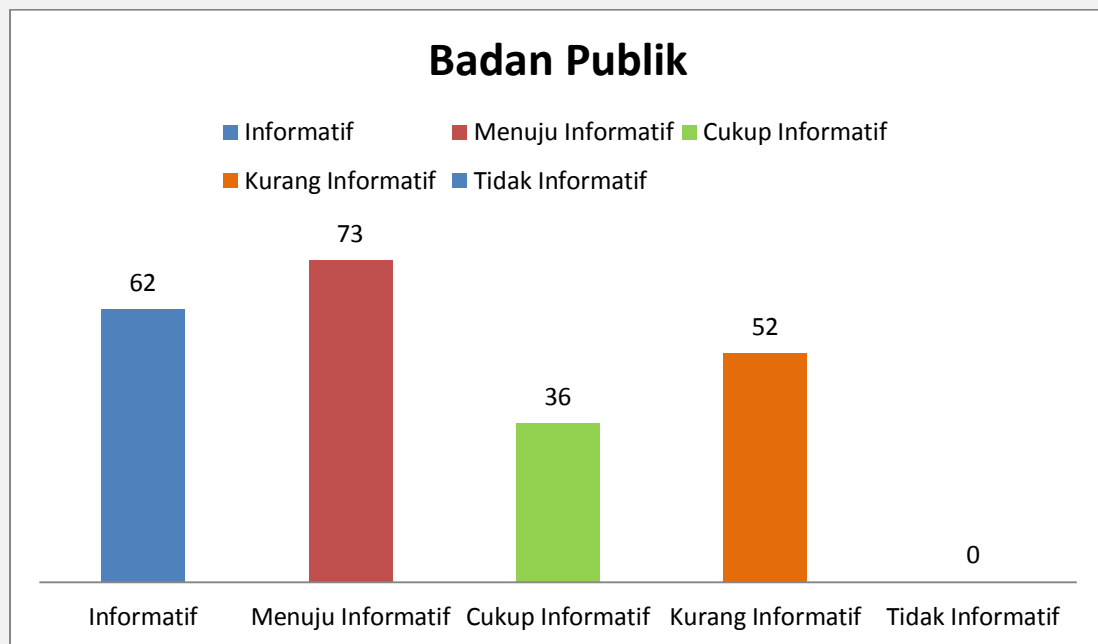


Foto bersama Acara KI Award Tahun 2024



Adapun hasil akhir dari penilaian monev adalah diberikannya penganugerahan keterbukaan informasi dengan kategori Badan Publik Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif pada 8 (lima) kategori Badan Publik, yaitu:

Peringkat Kategori Tahun 2024



Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara

No.	Nama Badan Publik	Peringkat
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara	Penghargaan Khusus

No.	Nama Badan Publik	Peringkat
1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi & Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara	Informatif
2	UPTD RS. Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara	Informatif
3	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara	Informatif
4	Dinas Perkebunan & Peternakan Provinsi Sumatera Utara	Informatif
5	Dinas Perumahan & kawasan permukiman Provinsi Sumatera Utara	Informatif
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara	Informatif
7	Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	Informatif
8	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara	Informatif
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera	Informatif



	Utara	
10	Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara	Informatif
11	Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	Informatif
12	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	Informatif
13	UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara	Informatif
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Provinsi Sumatera Utara	Informatif
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara	Informatif
16	Badan Kesatuan Bangsa & Politik Provinsi Sumatera Utara	Menuju Informatif
17	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	Menuju Informatif
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara	Menuju Informatif
19	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara	Menuju Informatif
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	Menuju Informatif
21	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	Menuju Informatif
22	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara	Menuju Informatif
23	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara	Menuju Informatif
24	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara	Cukup Informatif
25	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Provinsi Sumatera Utara	Cukup Informatif
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara	Cukup Informatif
27	Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara	Cukup Informatif
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara	Cukup Informatif
29	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	Kurang Informatif
30	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Kurang Informatif
31	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara	Kurang Informatif
32	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara	Kurang Informatif



Lembaga Vertikal

No.	Nama Badan Publik	Peringkat
1	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara	Informatif
2	BPJS Kesehatan Kedeputan Wilayah I	Informatif
3	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provsu	Cukup Informatif
4	PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II	Cukup Informatif
5	PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I	Cukup Informatif
6	PT. Pelabuhan Indonesia Persero – Regional I	Kurang Informatif
7	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provsu	Kurang Informatif
8	PT. Perkebunan Nusantara I Regional I	Kurang Informatif
9	Pengadilan Negeri Medan	Kurang Informatif
10	Pengadilan Tata Usaha Negara Medan	Kurang Informatif
11	BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Utara	Kurang Informatif

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

No.	Nama Badan Publik	Peringkat
1	PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	Informatif
2	PT. Dhirga Surya Sumatera Utara	Informatif
3	PT. Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara	Menuju Informatif
4	PT. Bank Sumut	Kurang Informatif
5	Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara	Kurang Informatif
6	PT. Perkebunan Sumatera Utara	Kurang Informatif



Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara

No.	Nama Badan Publik	Peringkat
1	Kota Binjai	Informatif
2	Kabupaten Serdang Bedagai	Informatif
3	Kabupaten Nias	Informatif
4	Kabupaten Karo	Informatif
5	Kota Tebing Tinggi	Informatif
6	Kabupaten Langkat	Informatif
7	Kabupaten Deli Serdang	Informatif
8	Kabupaten Toba	Informatif
9	Kabupaten Asahan	Informatif
10	Kota Pematang Siantar	Informatif
11	Kabupaten Tapanuli Selatan	Informatif
12	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Informatif
13	Kota Medan	Informatif
14	Kabupaten Humbang Hasundutan	Informatif
15	Kabupaten Tapanuli Utara	Informatif
16	Kota Tanjung Balai	Informatif
17	Kabupaten Tapanuli Tengah	Informatif
18	Kabupaten Nias Barat	Informatif
19	Kabupaten Batu Bara	Informatif
20	Kabupaten Labuhanbatu	Informatif
21	Kabupaten Simalungun	Informatif
22	Kabupaten Dairi	Informatif
23	Kabupaten Pakpak Bharat	Informatif
24	Kabupaten Padang Lawas	Menuju Informatif
25	Kabupaten Samosir	Menuju Informatif
26	Kabupaten Padang Lawas Utara	Menuju Informatif
27	Kabupaten Nias Utara	Menuju Informatif
28	Kota Sibolga	Menuju Informatif
29	Kota Gunung Sitoli	Cukup Informatif
30	Kota Padangsidempuan	Cukup Informatif
31	Kabupaten Nias Selatan	Cukup Informatif
32	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Cukup Informatif
33	Kabupaten Mandailing Natal	Kurang Informatif



Pemerintah Desa Kabupaten/Kota Sumatera Utara

No.	Nama Badan Publik	Peringkat
1	Desa N-4 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu	Informatif
2	Desa Sigumpar Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba	Informatif
3	Desa Sisobahili Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara	Informatif
4	Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang	Informatif
5	Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai	Informatif
6	Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba	Menuju Informatif
7	Desa Perkebunan Hapesong Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan	Menuju Informatif
8	Desa Pamuntaran Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara	Menuju Informatif
9	Desa Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara	Menuju Informatif
10	Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan	Menuju Informatif
11	Desa Hiliwaele Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat	Menuju Informatif
12	Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat	Menuju Informatif
13	Desa Kuta Mbelin Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang	Cukup Informatif
14	Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan	Cukup Informatif
15	Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan	Cukup Informatif
16	Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara	Cukup Informatif
17	Desa Durian Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara	Cukup Informatif
18	Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara	Cukup Informatif
19	Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir	Kurang Informatif
20	Desa Ambarita Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir	Kurang Informatif
21	Desa Hiligeo Avia Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara	Kurang Informatif
22	Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu	Kurang Informatif



	Kabupaten Labuhanbatu	
23	Desa Baru Pasar 8 Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat	Kurang Informatif
24	Desa Sitio-tio Hilir Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah	Kurang Informatif
25	Desa Aek Horsik Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah	Kurang Informatif
26	Desa Umbu Kecamatan Gido Kabupaten Nias	Kurang Informatif
27	Desa Hiligodu Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias	Kurang Informatif
28	Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai	Kurang Informatif
29	Desa Bonanionan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten HumbangHasundutan	Kurang Informatif
30	Desa Pearung Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan	Kurang Informatif
31	Desa Gunung Melayu Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara	Kurang Informatif
32	Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara	Kurang Informatif
33	Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunung Sitoli	Kurang Informatif
34	Desa Hilimbawadesolo Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunung Sitoli	Kurang Informatif
35	Desa Bukit Tinggi Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat	Kurang Informatif
36	Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara	Kurang Informatif
37	Desa Gurung Barani Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal	Kurang Informatif
38	Desa Banua Rakyat Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal	Kurang Informatif



Kementerian Agama se-Sumatera Utara

No.	Nama Badan Publik	Peringkat
1	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provsu	Informatif
2	Kemenag Kabupaten Dairi	Informatif
3	Kemenag Kabupaten Tapanuli Selatan	Menuju Informatif
4	Kemenag Kabupaten Labuhanbatu Utara	Menuju Informatif
5	Kemenag Kota Gunung Sitoli	Menuju Informatif
6	Kemenag Kabupaten Serdang Bedagai	Menuju Informatif
7	Kemenag Kabupaten Toba	Menuju Informatif
8	Kemenag Kabupaten Humbang Hasundutan	Menuju Informatif
9	Kemenag Kota Tebing Tinggi	Menuju Informatif
10	Kemenag Kabupaten Samosir	Menuju Informatif
11	Kemenag Kabupaten Tapanuli Utara	Menuju Informatif
12	Kemenag Kabupaten Mandailing Natal	Menuju Informatif
13	Kemenag Kabupaten Tapanuli Tengah	Menuju Informatif
14	Kemenag Kabupaten Karo	Menuju Informatif
15	Kemenag Kota Tanjung Balai	Cukup Informatif
16	Kemenag Kabupaten Padang Lawas	Cukup Informatif
17	Kemenag Kabupaten Nias Utara	Cukup Informatif
18	Kemenag Kabupaten Nias Barat	Cukup Informatif
19	Kemenag Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Cukup Informatif
20	Kemenag Kabupaten Labuhanbatu	Cukup Informatif
21	Kemenag Kota Pematang Siantar	Cukup Informatif
22	Kemenag Kabupaten Asahan	Cukup Informatif
23	Kemenag Kabupaten Pakpak Bharat	Cukup Informatif
24	Kemenag Kabupaten Padang Lawas Utara	Cukup Informatif
25	Kemenag Kota Sibolga	Cukup Informatif
26	Kemenag Kabupaten Batu Bara	Kurang Informatif
27	Kemenag Kabupaten Deli Serdang	Kurang Informatif
28	Kemenag Kabupaten Langkat	Kurang Informatif
29	Kemenag Kabupaten Nias	Kurang Informatif
30	Kemenag Kabupaten Nias Selatan	Kurang Informatif
31	Kemenag Kabupaten Simalungun	Kurang Informatif
32	Kemenag Kota Binjai	Kurang Informatif
33	Kemenag Kota Medan	Kurang Informatif
34	Kemenag Kota Padangsidimpuan	Kurang Informatif



Komisi Pemilihan Umum (KPU)

No.	Nama Badan Publik	Peringkat
1	KPU Kabupaten Asahan	Informatif
2	KPU Kota Padangsidempuan	Informatif
3	KPU Kabupaten Dairi	Informatif
4	KPU Kabupaten Batu Bara	Informatif
5	KPU Kota Sibolga	Informatif
6	KPU Provinsi Sumatera Utara	Informatif
7	KPU Kabupaten Langkat	Informatif
8	KPU Kota Tebing Tinggi	Informatif
9	KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Informatif
10	KPU Kota Binjai	Menuju Informatif
11	KPU Kabupaten Mandailing Natal	Menuju Informatif
12	KPU Kabupaten Labuhanbatu	Menuju Informatif
13	KPU Kabupaten Samosir	Menuju Informatif
14	KPU Kabupaten Simalungun	Menuju Informatif
15	KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Menuju Informatif
16	KPU Kota Gunungsitoli	Menuju Informatif
17	KPU Kota Tanjung Balai	Menuju Informatif
18	KPU Kabupaten Deli Serdang	Menuju Informatif
19	KPU Kota Pematangsiantar	Menuju Informatif
20	KPU Kabupaten Padang Lawas	Menuju Informatif
21	KPU Kabupaten PakPak Bharat	Menuju Informatif
22	KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara	Menuju Informatif
23	KPU Kabupaten Padang Lawas Utara	Menuju Informatif
24	KPU Kabupaten Serdang Bedagai	Menuju Informatif
25	KPU Kabupaten Humbang Hasundutan	Menuju Informatif
26	KPU Kabupaten Karo	Menuju Informatif
27	KPU Kota Medan	Menuju Informatif
28	KPU Kabupaten Toba	Menuju Informatif
29	KPU Kabupaten Tapanuli Utara	Menuju Informatif
30	KPU Kabupaten Nias Barat	Cukup Informatif
31	KPU Kabupaten Nias	Kurang Informatif
32	KPU Kabupaten Nias Selatan	Kurang Informatif
33	KPU Kabupaten Nias Utara	Kurang Informatif
34	KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	Kurang Informatif



Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

No.	Nama Badan Publik	Peringkat
1	BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu Utara	Informatif
2	BAWASLU Provinsi Sumatera Utara	Informatif
3	BAWASLU Kota Tanjungbalai	Informatif
4	BAWASLU Kabupaten Deli Serdang	Menuju Informatif
5	BAWASLU Kabupaten Karo	Menuju Informatif
6	BAWASLU Kabupaten Asahan	Menuju Informatif
7	BAWASLU Kabupaten Toba	Menuju Informatif
8	BAWASLU Kota Sibolga	Menuju Informatif
9	BAWASLU Kota Padangsidimpuan	Menuju Informatif
10	BAWASLU Kabupaten Padang Lawas Utara	Menuju Informatif
11	BAWASLU Kabupaten Dairi	Menuju Informatif
12	BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Menuju Informatif
13	BAWASLU Kota Tebing Tinggi	Menuju Informatif
14	BAWASLU Kota Binjai	Menuju Informatif
15	BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu	Menuju Informatif
16	BAWASLU Kota Medan	Menuju Informatif
17	BAWASLU Kota Pematangsiantar	Menuju Informatif
18	BAWASLU Kabupaten Humbang Hasundutan	Menuju Informatif
19	BAWASLU Kabupaten Samosir	Menuju Informatif
20	BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai	Menuju Informatif
21	BAWASLU Kabupaten Pakpak Bharat	Menuju Informatif
22	BAWASLU Kabupaten Nias Barat	Menuju Informatif
23	BAWASLU Kabupaten Langkat	Menuju Informatif
24	BAWASLU Kabupaten Nias Selatan	Cukup Informatif
25	BAWASLU Kota Gunungsitoli	Cukup Informatif
26	BAWASLU Kabupaten Tapanuli Utara	Cukup Informatif
27	BAWASLU Kabupaten Mandailing Natal	Cukup Informatif
28	BAWASLU Kabupaten Nias	Cukup Informatif
29	BAWASLU Kabupaten Tapanuli Tengah	Cukup Informatif
30	BAWASLU Kabupaten Nias Utara	Kurang Informatif
31	BAWASLU Kabupaten Padang Lawas	Kurang Informatif
32	BAWASLU Kabupaten Simalungun	Kurang Informatif
33	BAWASLU Kabupaten Tapanuli Selatan	Kurang Informatif
34	BAWASLU Kabupaten Batu Bara	Kurang Informatif

4. Forum Group Discussion (FGD)

a. Focus Group Discussion Indeks Keterbukaan Informasi Publik (FGD IKIP)



Anggota Komisi Informasi Pusat Rospita Vicy Paulyn menegaskan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan kesempatan bagi Informan Ahli untuk mempertahankan atau merubah nilai yang diberikan oleh Informan Ahli pada pertanyaan yang diberikan. Hal itu ditegaskan Vici ketika memberikan sambutan sekaligus membuka FGD IKIP Tahun 2024, Selasa 23 Juli 2024 di Hotel Four Point Medan. Vici menegaskan pelaksanaan IKIP ini sudah digelar empat tahun berturut turut yakni 2021, 2022, 2022 dan 2024. "Hasil IKIP Tahun 2023 itu secara Nasional mencapai 75 dan kita berharap Tahun 2024 juga mencapai nilai yang sama. Kami berharap Indeks tahun 2024 secara Nasional paling tidak bisa sama dengan tahun sebelumnya," kata Vici. Vici juga mengungkapkan bahwa IKIP ini bertujuan untuk memotret keterbukaan informasi di tingkat provinsi khususnya di Sumut. "Dimana nanti ada kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik maka Komisi Informasi Pusat akan melakukan dukungan," kata Vici kembali. Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) Dr. Cut Alma Nuraflah, MA menegaskan bahwa FGD digelar untuk memberikan data dan fakta kepada informan ahli bisa menilai secara logis terkait keterbukaan informasi di Sumut. Wakil Ketua Komisi Informasi Sumut Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si IKIP Sumut harus lebih baik dari tahun sebelumnya. "Dengan adanya peningkatan

pelayanan informasi publik oleh badan publik maka sudah pantas IKIP menjadi baik lagi” ujar Eddy Sormin.

Pelaksanaan FGD IKIP Tahun 2024 ini diikuti oleh seluruh Informan Ahli yakni Prof Dr Rita Dalimunthe, drg Hj Hartati Zuraída Rangkuti Sp Ort, Phd, Dr Nispul Khoiri, Dr Danialsyah SH, MH, Dr Muazzul SH,MHum, Arif Budiman MPd, Amru Lubis,Spdi, Jamaluddin S.Pdi. Tim Pokjada Dr Cut Alma Nuraflah, Drs Eddy Syahputra AS MSi, Dr Urip, Drs Zulfikar Tanjung, Lenti Purba. Tim Komisi Informasi Pusat Fransiskus Surdiasis (Tim Ahli), serta sejumlah staf yakni Annisa Mardiana, Olyvia Pradhira, Annisa Nur Fitriyanti, Wenni Feriana dan Indra Hasby.

b. FGD Penyelesaian Sengketa Informasi dalam Sistem Ajudikasi Nonlitigasi Komisi Informasi Publik



Jumat, 1 November 2024, Ketua Komisi Informasi Provsu (Abd. Harris Nasution, SH, M.Kn) di dampingi Ketua Divisi PSI (Muhammad Safii Sitorus, SH, M.I.Kom) dan Ketua Divisi Kelembagaan (Dr. Cut Alma Nuraflah, MA) menerima Mahasiswa USU dalam Kegiatan Penyelesaian Sengketa Informasi dalam Sistem Ajudikasi Nonlitigasi Komisi Informasi Publik (Klinik Hukum Perdata) di Kantor Komisi Informasi Provsu.

5. Kerjasama dengan Stakeholder

a. Kerjasama dengan Universitas Darma Agung Medan

Ketua Komisi Informasi Sumut Dr Abd Harris Nasution SH, MKn mengajak mahasiswa Universitas Darma Agung menjadi agen keterbukaan informasi publik di tengah-tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Harris ketika menjadi narasumber dalam seminar Keterbukaan Informasi Publik dengan tema Langkah Penting Keterlibatan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Sumut, Selasa (16/1/2024) di Hermina Hall Universitas Darma Agung.



Penandatanganan MOU dan MOA antara Komisi Informasi Provsu dengan Universitas Darma Agung Medan, Fakultas Hukum UDA Medan, Fakultas Fisip UDA Medan

Usai seminar dilakukan, Penandatanganan MOU antara Rektor Universitas Darma Agung Dr. Mhd Ansori Lubis SH, MM, MHum dengan Ketua Komisi Informasi Sumut Dr. Abd Harris Nasution SH, MKn, dilanjutkan dengan MOA antara Dekan Fakultas Hukum Universitas Darma Agung serta Dekan FISIP Universitas Darma Agung Dr Prietsaweny RT Simamora M.Si disaksikan juga oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Sumut Drs. Eddy Syahputra AS, MSi dan Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Muhammad Safii Sitorus SH, M.I.Kom.



b. Kerjasama dengan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Kamis, 15 Februari 2024 Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.



c. Kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kamis, 5 Juni 2024 Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.



d. Kerjasama dengan KPU Provinsi Sumatera Utara



KPU Sumut dan KIP Sumut Tandatangani MoU Keterbukaan Informasi Publik Jelang Pilkada Serentak 2024. Dalam rangka mempersiapkan Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sumut mengenai keterbukaan informasi publik. Acara penandatanganan ini berlangsung di kantor KPU Sumut pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Kerja sama ini merupakan langkah lanjutan dari MoU serupa yang telah dilakukan di tingkat pusat antara kedua lembaga negara tersebut. Ketua KIP Sumut, Dr. Abdul Haris Nasution, SH, M.Kn didampingi oleh komisioner lainnya Muhammad Safii Sitorus, SH, Drs. Edy Syahputra AS, M.Si, Dr. Cut Alma Nuraflah, MA, dan Dedy Ardiansyah, S.Sos menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Sumatera Utara.

e. Kerjasama dengan Universitas Negeri Medan Sumatera Utara

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Informasi Provsu dengan Universitas Negeri Medan Sumatera Utara



Universitas Negeri Medan (Unimed) resmi bekerjasama dengan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera dalam bidang penelitian, pengabdian pada masyarakat dan peningkatan layanan informasi publik. Penandatanganan MoU antara kedua dilaksanakan pada Selasa, 20 Agustus 2024 di Ruang Rektor Unimed.

Penandatanganan langsung dilakukan oleh Rektor Unimed Prof. Dr. Baharuddin, ST., M.Pd. dengan Ketua KI Provinsi Sumatera Utara Dr. Abdul Haris Nasution, SH., M.Kn. Turut Hadir Wakil Rektor IV Unimed Prof. Dr. Erond Litno Damanik, M.Si, Kepala Humas Unimed Dr. M. Surip, S.Pd., M.Si, Kepala KUI Unimed Maya Oktora, S.Pd., M.Hum. dan Komisioner KI Sumut Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si. bersama staf KI Sumatera Utara.



f. Kerjasama dengan LPP RRI Medan

Senin, 14 Oktober 2024 Komisioner Komisi Informasi Sumut menerima Kunjungan Kepala LPP RRI Medan Bapak Raden Muhammad Yusridarto, S.sos, M.Ikom beserta Jajaran sekaligus Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara LPP RRI Medan dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara mengenai keterbukaan informasi publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Informasi Provsu dengan LPP RRI Medan



C. APBD Komisi Informasi Tahun 2024

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Kegiatan	: 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.993.339.100,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	87 %	Capaian Program	Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	87 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.086.323.300,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.993.339.100,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12 Dokumen
Hasil	Meningkatnya pemahaman masyarakat atas kebijakan dan program prioritas pemerintah	100 %	Hasil	Meningkatnya pemahaman masyarakat atas kebijakan dan program prioritas pemerintah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)			
5	BELANJA DAERAH					2.086.323.300,00					1.993.339.100,00	-92.984.200,00		
5.1	BELANJA OPERASI					2.086.323.300,00					1.993.339.100,00	-92.984.200,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.086.323.300,00					1.993.339.100,00	-92.984.200,00		
5.1.02.01	Belanja Barang					138.246.800,00					103.377.600,00	-34.869.200,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					138.246.800,00					103.377.600,00	-34.869.200,00		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					57.746.800,00					52.677.600,00	-4.869.200,00		
	[#] Belanja Cetak Monev KIP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					17.000.000,00					9.200.000,00	-7.800.000,00		
	[-] Belanja Cetak Monev KIP					17.000.000,00					9.200.000,00	-7.800.000,00		
	Cetak Program (art paper) Spesifikasi :	200	Lembar	eks	48.000,00	-	9.200.000,00	200	Lembar	eks	48.000,00	-	0,00	
	Cetak Undangan Kegiatan (Beser) Spesifikasi : Cetak Undangan	500	Lembar	Lembar	15.600,00	-	7.800.000,00	0	Lembar	Lembar	15.600,00	-	0,00	-7.800.000,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					37.246.800,00					40.177.600,00	2.930.800,00		
	[-] belanja cetak					26.712.500,00					29.062.500,00	3.250.000,00		
	Amplop Dinas Spesifikasi :	60	Per Bungkus	Per Bungkus	44.000,00	-	2.640.000,00	60	Per Bungkus	Per Bungkus	44.000,00	-	0,00	0,00
	Cetak kop surat bertambarang Spesifikasi : -	36	Rim	Rim	130.000,00	-	4.680.000,00	36	Rim	Rim	130.000,00	-	0,00	0,00
	Cetak laporan Spesifikasi :	30	Set	eks	550.000,00	-	16.500.000,00	30	Set	eks	550.000,00	-	0,00	0,00
	Cetak map bertambarang Spesifikasi : -	445	Lembar	Lembar	8.500,00	-	2.862.500,00	945	Lembar	Lembar	8.500,00	-	0,00	3.250.000,00



Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Biaya Foto Copy HVS					10.534.300,00					10.215.100,00	-319.200,00
	Biaya Foto Copy HVS Spesifikasi : HVS	30066	Lembar	350,00	-	10.534.300,00	29186	Lembar	350,00	-	10.215.100,00	-319.200,00
	[#] Cetak Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.500.000,00					3.500.000,00	0,00
	[-] Cetak Spanduk					3.500.000,00					3.500.000,00	0,00
	Cetakan Spanduk ukuran 1 x 6 m Spesifikasi :-	10	Buah	350.000,00	-	3.500.000,00	10	Buah	350.000,00	-	3.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Parabot Kantor					5.500.000,00					5.500.000,00	0,00
	[#] Bingkai Piagam Monev KIP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.500.000,00					5.500.000,00	0,00
	[-] Bingkai Piagam Monev KIP					5.500.000,00					5.500.000,00	0,00
	Bingkai Foto Spesifikasi :-	100	Buah	55.000,00	-	5.500.000,00	100	Buah	55.000,00	-	5.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					75.000.000,00					45.000.000,00	-30.000.000,00
	[#] belanja cenderamata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					75.000.000,00					45.000.000,00	-30.000.000,00
	[-] belanja cenderamata					75.000.000,00					45.000.000,00	-30.000.000,00
	Cenderamata - Plakat Spesifikasi :-	50	Buah	1.500.000,00	-	75.000.000,00	30	Buah	1.500.000,00	-	45.000.000,00	-30.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.497.540.500,00					1.489.391.500,00	-8.149.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.497.540.500,00					1.472.391.500,00	-25.149.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					28.300.000,00					28.300.000,00	0,00
	[#] Asistensi Keterbukaan Informasi Publik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.500.000,00					15.500.000,00	0,00
	[-] Asistensi Keterbukaan Informasi Publik					15.500.000,00					15.500.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	5	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	3.500.000,00	5	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	3.500.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	5	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	2.000.000,00	5	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon II/ Yang Diangkatkan Spesifikasi :-	10	Orang / Jam	1.000.000,00	-	10.000.000,00	10	Orang / Jam	1.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	[#] FGD Penyusunan Ranperda Keterbukaan Informasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.300.000,00					11.300.000,00	0,00
	[-] FGD Penyusunan Ranperda Keterbukaan Informasi					11.300.000,00					11.300.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional - Honorarium Narasumber Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	6	Orang / Jam	1.700.000,00	-	10.200.000,00	6	Orang / Jam	1.700.000,00	-	10.200.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	700.000,00	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	700.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	0,00
	[#] Honorarium Pembawa Acara Monev KIP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pembawa Acara Monev KIP					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional - Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2	Orang / Kegiatan	750.000,00	-	1.500.000,00	2	Orang / Kegiatan	750.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pembeli Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Bersacara					7.200.000,00					7.200.000,00	0,00
	[#] Saksi Ahli Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.200.000,00					7.200.000,00	0,00
	[-] Saksi Ahli Penyelesaian Sengketa Informasi Publik					7.200.000,00					7.200.000,00	0,00
	Honorarium Pembeli Keterangan Ahli Saksi Ahli Dan Bersacara - Honorarium Pembeli Keterangan Ahli/Saksi Ahli Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4	Orang / Kegiatan	1.800.000,00	-	7.200.000,00	4	Orang / Kegiatan	1.800.000,00	-	7.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					1.432.880.000,00					1.432.880.000,00	0,00
	[#] Honorarium Komisiner Komisi Informasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.432.880.000,00					1.432.880.000,00	0,00
	[-] Honorarium Komisiner Komisi Informasi					1.432.880.000,00					1.432.880.000,00	0,00
	Honorarium Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara - Anggota Spesifikasi :-	3	Orang x 12 Bulan	13.500.000,00	-	405.000.000,00	3	Orang x 12 Bulan	13.500.000,00	-	405.000.000,00	0,00
	Honorarium Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara - Ketua Spesifikasi :-	1	Orang x 12 Bulan	13.500.000,00	-	162.000.000,00	1	Orang x 12 Bulan	13.500.000,00	-	162.000.000,00	0,00
	Honorarium Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara - Wakil Ketua Spesifikasi :-	1	Orang x 12 Bulan	13.500.000,00	-	162.000.000,00	1	Orang x 12 Bulan	13.500.000,00	-	162.000.000,00	0,00
	Penghasilan Gaji Ke-13 Non PNS untuk Komisiner Informasi Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi :-	5	Orang / Kali	15.488.000,00	-	77.440.000,00	5	Orang / Kali	15.488.000,00	-	77.440.000,00	0,00
	Tunjangan Hari Raya Non PNS untuk Komisiner Informasi Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi :-	5	Orang / Kali	15.488.000,00	-	77.440.000,00	5	Orang / Kali	15.488.000,00	-	77.440.000,00	0,00
	Tunjangan Jabatan Anggota KIP Spesifikasi : NaN	3	Orang x 12 Bulan	2.000.000,00	-	72.000.000,00	3	Orang x 12 Bulan	2.000.000,00	-	72.000.000,00	0,00
	Tunjangan Jabatan Ketua KIP Spesifikasi : NaN	1	Orang x 12 Bulan	3.000.000,00	-	36.000.000,00	1	Orang x 12 Bulan	3.000.000,00	-	36.000.000,00	0,00
	Tunjangan Jabatan Wakil Ketua KIP Spesifikasi : NaN	1	Orang x 12 Bulan	2.500.000,00	-	30.000.000,00	1	Orang x 12 Bulan	2.500.000,00	-	30.000.000,00	0,00
	Tunjangan Kesra Anggota KIP Spesifikasi : NaN	3	Orang x 12 Bulan	5.500.000,00	-	168.000.000,00	3	Orang x 12 Bulan	5.500.000,00	-	198.000.000,00	0,00



Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Tunjangan Keras Ketua KIP Spesifikasi : NaN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.500.000,00	-	66.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.500.000,00	-	66.000.000,00	0,00
	Tunjangan Keras Wakil Ketua KIP Spesifikasi : NaN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.500.000,00	-	66.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.500.000,00	-	66.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					8.910.500,00					4.011.500,00	-4.899.000,00
	[#] Belanja Paket/Pengiriman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.910.500,00					4.011.500,00	-4.899.000,00
	[-] Paket Pos Ekspres					8.910.500,00					4.011.500,00	-4.899.000,00
	Paket Pos Ekspres (Dokumen) Spesifikasi : -	251 Buah	Buah	35.500,00	-	8.910.500,00	113 Buah	Buah	35.500,00	-	4.011.500,00	-4.899.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Kesanggotaan					20.250.000,00					0,00	-20.250.000,00
	[#] Peningkatan SDM Komisi Informasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.250.000,00					0,00	-20.250.000,00
	[-] Peningkatan SDM Komisi Informasi					20.250.000,00					0,00	-20.250.000,00
	Biaya Registrasi Pendidikan Mediator Spesifikasi : -	3 Orang	Orang	6.750.000,00	-	20.250.000,00	0 Orang	Orang	6.750.000,00	-	0,00	-20.250.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					0,00					17.000.000,00	17.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					0,00					17.000.000,00	17.000.000,00
	[#] Biaya Kontribusi Diklat/Pelatihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					17.000.000,00	17.000.000,00
	[-] Biaya Kontribusi Diklat/Pelatihan					0,00					17.000.000,00	17.000.000,00
	Biaya Kursus dan Pendidikan serta Pelatihan Mediator Spesifikasi : -	-	Orang	0,00	-	0,00	2 Orang	Orang	8.500.000,00	-	17.000.000,00	17.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					450.536.000,00					400.570.000,00	-49.966.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					450.536.000,00					400.570.000,00	-49.966.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					352.636.000,00					352.510.000,00	-126.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					152.378.000,00					203.010.000,00	50.632.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					152.378.000,00					203.010.000,00	50.632.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	24 Orang / Kali	Orang / Kali	232.000,00	-	5.568.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	232.000,00	-	6.960.000,00	1.392.000,00
	Satuan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD / Pejabat Eselon II - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	60 Orang / Hari	Orang / Hari	1.518.000,00	-	91.080.000,00	75 Orang / Hari	Orang / Hari	1.518.000,00	-	113.850.000,00	22.770.000,00
	Satuan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III / Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	12 Orang / Hari	Orang / Hari	1.100.000,00	-	13.200.000,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	1.100.000,00	-	33.000.000,00	19.800.000,00
	Satuan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV / Golongan III - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	23 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	12.190.000,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	15.900.000,00	3.710.000,00
	Uang Makan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	82 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	30.340.000,00	90 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	33.300.000,00	2.960.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					200.258.000,00					149.500.000,00	-50.758.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					200.258.000,00					149.500.000,00	-50.758.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	25 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	6.400.000,00	20 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	5.120.000,00	-1.280.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi Jakarta - Medan Spesifikasi : -	24 Orang / Kali	Orang	3.898.000,00	-	91.392.000,00	20 Orang / Kali	Orang	3.898.000,00	-	76.160.000,00	-15.232.000,00
	Satuan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD / Pejabat Eselon II - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	34 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000,00	-	50.860.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000,00	-	29.800.000,00	-20.860.000,00
	Satuan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Golongan III - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	10 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	7.300.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	7.300.000,00	0,00
	Satuan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III / Golongan IV - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	8 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	7.936.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	9.920.000,00	1.984.000,00
	Uang Makan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	69 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	36.570.000,00	40 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	21.200.000,00	-15.370.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					97.900.000,00					48.060.000,00	-49.840.000,00
	[#] Asistensi Keterbukaan Informasi Publik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					35.600.000,00					8.900.000,00	-26.700.000,00
	[-] Asistensi Keterbukaan Informasi Publik					35.600.000,00					8.900.000,00	-26.700.000,00
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Selingkat Kepala Daerah Atau Eselon II Halfday - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	200 Orang / Paket	Orang / Paket	178.000,00	-	35.600.000,00	50 Orang / Paket	Orang / Paket	178.000,00	-	8.900.000,00	-26.700.000,00
	[#] FGD Penyusunan Ranperda Keterbukaan Informasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.900.000,00					3.560.000,00	-5.340.000,00
	[-] FGD Penyusunan Ranperda Keterbukaan Informasi					8.900.000,00					3.560.000,00	-5.340.000,00
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Selingkat Kepala Daerah Atau Eselon II Halfday - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	50 Orang / Paket	Orang / Paket	178.000,00	-	8.900.000,00	20 Orang / Paket	Orang / Paket	178.000,00	-	3.560.000,00	-5.340.000,00
	[#] Kegiatan Monv KIP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					53.400.000,00					35.600.000,00	-17.800.000,00
	[-] Kegiatan Monv KIP					53.400.000,00					35.600.000,00	-17.800.000,00



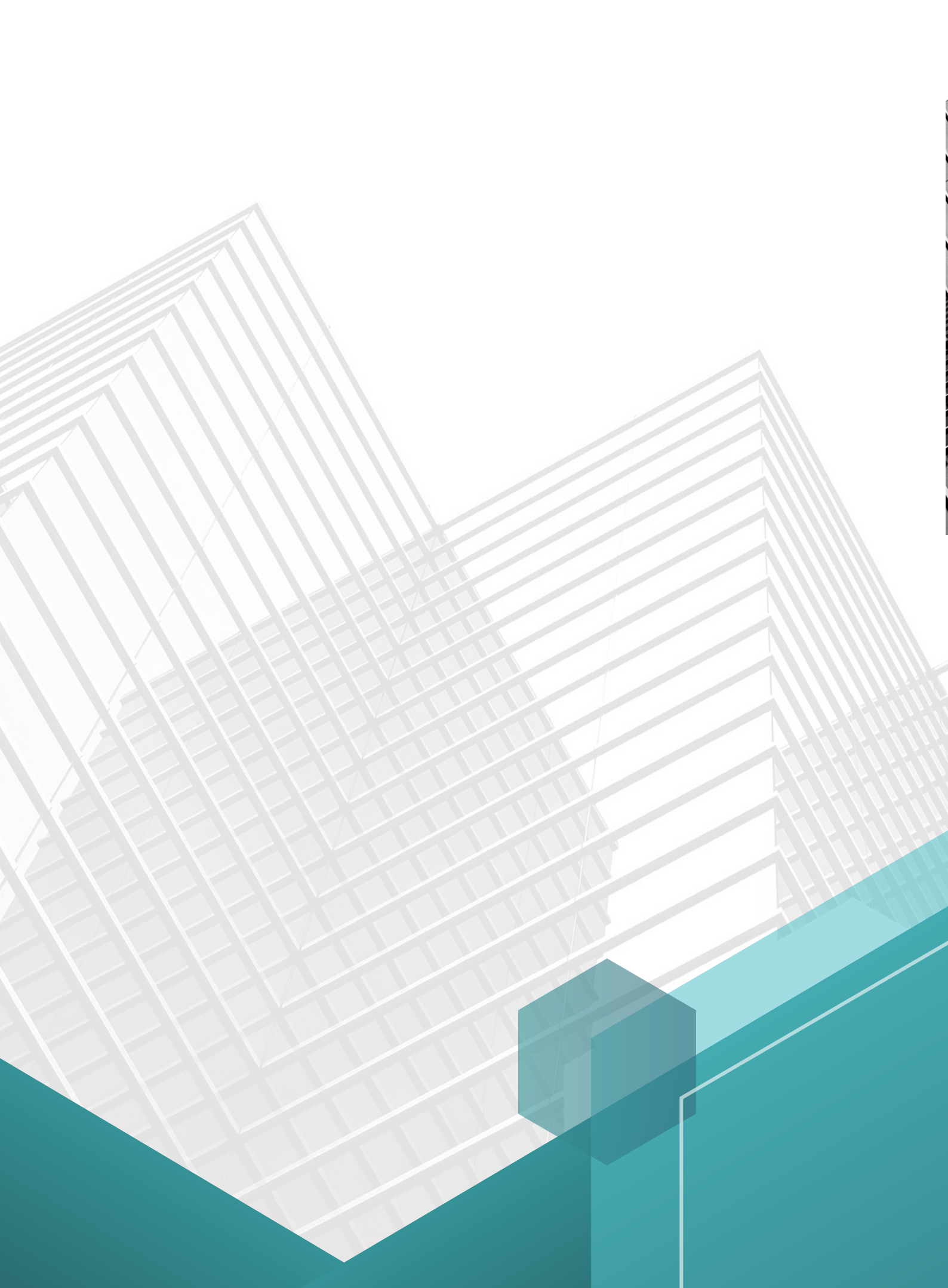
Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				



PENUTUP

Demikianlah Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, Ketua, Pimpinan, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Komisi Informasi Pusat, serta kepada seluruh rakyat Sumatera Utara. Semoga Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan kinerja Komisi Informasi Sumatera Utara pada tahun berikutnya, evaluasi implementasikan Keterbukaan Informasi Publik di Sumatera Utara, dan umumnya pada siapa saja yang memerlukan.

Ketua, Wakil Ketua, para Komisioner, Sekretaris dan seluruh staf Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu optimalnya kinerja Komisi Informasi Sumatera Utara Tahun 2024, sekaligus memohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Selanjutnya, kami ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder atas segala kerjasama dan sinergi yang telah terjalin selama ini. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan mendukung upaya perbaikan berkesinambungan bagi Komisi Informasi Sumatera Utara. Terima kasih telah berkontribusi dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi keterbukaan informasi publik di Provinsi Sumatera Utara.



kip.sumutprov.go.id



[kiprovsu](https://www.facebook.com/kiprovsu)



+62 61 42788901



[ki_provsu](https://www.instagram.com/ki_provsu)



kipsumut@yahoo.co.id